

**Pembangunan Desa Dalam Era Milenial
(Studi Kasus Pemberdayaan Pemuda di Desa Bana,
Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone)**

*“Village Development in the Millennial Era
(Case Study of Youth Empowerment in Bana Village, Bontocani District,
Bone Regency)”*

Nurhan Henriawan

P022171330



**PROGRAM PASCASARJANA UNUVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR 2019**

**Pembangunan Desa Dalam Era Milenial
(Studi Kasus Pemberdayaan Pemuda di Desa Bana,
Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone)**

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi

Perencanaan dan Pengembangan Wilayah

Disusun dan diajukan oleh

NURHAN HENRIAWAN

kepada

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2019

TESIS

**PEMBANGUNAN DESA DALAM ERA MILENIAL
(STUDI KASUS PEMBERDAYAAN PEMUDA DI DESA BANA
KECAMATAN BONTOCANI, KABUPATEN BONE)**

Disusun dan diajukan oleh

NURHAN HENRIAWAN
Nomor Pokok P022171330

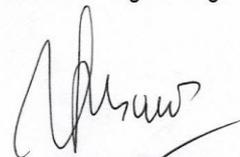
telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis
pada tanggal 9 Agustus 2019
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui
Komisi Penasehat,


Prof. Dr. Muhammad Asdar, SE., M.Si
Ketua


Dr. Muhammad Idrus Taba, SE., M.Si
Anggota

Ketua Program Studi
Perencanaan Pengembangan Wilayah,


Prof. Dr. Ir. Ahmad Munir, M.Eng

Dekan Sekolah Pascasarjana
Universitas Hasanuddin,


Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc



PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Nurhan Henriawan
Nomor Mahasiswa : P022171330
Program Studi : Perencanaan dan
Pengembangan Wilayah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 9 Agustus 2019

Yang menyatakan,

NURHAN HENRIAWAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis Panjatkan kepada Allah Yang Maha Esa atas segala berkat dan kasih karunia-Nya sehingga Tesis ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Magister Perencanaan dan Pengembangan Wilayah dan Manajemen Kepemimpinan Pemuda, Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar.

Adapun judul tesis penelitian ini adalah: "Pembangunan Desa Dalam Era Millenial: Study Khusus Pemberdayaan Pemuda Di Desa Bana, Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone".

Di dalam menyelesaikan Tesis ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik berupa pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu Penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat para pembimbing: Prof. Dr. Muhammad Asdar, SE, M.Si dan Dr. Muhammad Idrus Taba, SE, M.Si. Dimana di tengah-tengah kesibukannya masih tetap meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, petunjuk, dan mendorong semangat penulis untuk menyelesaikan penulisan Tesis ini.

Perkenankanlah juga, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian studi ini, kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Ibunda Prof. Dr. Dwia Aries Tina NK,.MA, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan.
2. Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Ir. Jamaluddin, M.Sc, atas kesempatan yang diberikan menjadi mahasiswa Program Magister Perencanaan dan Pengembangan Wilayah di Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
3. Ketua Program Studi Magister Perencanaan dan Pengembangan Wilayah / Manajemen Kepemimpinan Pemuda, Universitas Hasanuddin. Prof. Dr. Ir. Ahmad Munir, M.Eng.
4. Prof. Dr. Muhammad Asdar, SE. M.Si, sebagai Pembimbing Utama penulis, yang telah meluangkan waktunya dan dengan penuh perhatian memberikan dorongan, bimbingan, saran kepada penulis.
5. Dr. Muhammad Idrus Taba, SE. M.Si sebagai Pembimbing dua penulis, yang telah meluangkan waktunya dan dengan penuh perhatian memberikan dorongan, bimbingan, saran kepada penulis
6. Orang Tua tercinta, Ayahanda Hasan dan Ibunda Nurmiati S.Pd yang mendidik dengan penuh rasa kasih sayang dan senantiasa memberi semangat dan dorongan kepada penulis.
7. Kepada Istri Fitrianti M yang Penulis sayangi, atas kesabaran dan pengertiannya serta memberikan Doa dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan Tesis.

8. Kepada Adik Zulkifli Dwi Angriawan, yang Penulis sayangi, atas kesabaran dan pengertiannya serta memberikan Doa dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan Tesis.
9. Kepada Kepala Desa Bana Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone yang memberikan kesempatan pada penulis untuk melakukan penelitian demi keperluan data Tesis ini.
10. Rekan-rekan organisasi saya, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Makassar, rekan-rekan Mahasiswa Pancasila atas masukkan serta memberikan Doa dan semangat kepada penulis dalam penulisan Tesis ini.
11. Kepada Rekan – rekan mahasiswa Program Studi Perencanaan dan Pengembangan Wilayah / Manajemen Kepemimpinan Pemuda angkatan Tahun 2017
12. Kepada Rekan - rekan mahasiswa pascasarjana, dan rekan-rekan kerja saya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
13. Ucapan terimakasih penulis ucapkan pada Kepala Desa Bana, Ishak S.Pdl atas terlasamanya salam menyelesaikan tesis ini.
14. Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan pada tokoh pemuda Desa Bana atas kesediaan waktunya memberikan keterangan dalam menyelesaikan tesis ini.
15. Kepada pemerintah Kecamatan Bontocani dalam hal ini Camat Bontocani atas kerjasamanya dalam proses penelitian.

Akhirnya penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat dan permintaan maaf yang tulus jika seandainya dalam penulisan ini terdapat kekurangan dan kekeliruan, penulis juga menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi menyempurnakan penulisan tesis ini.

Makassar, 1 Mei 2019

Nurhan Henriawan

ABSTRAK

NURHAN HENRIAWAN. *Pengembangan Desa dalam Era Milenial: Studi Kasus Pemberdayaan Pemuda di Desa Bana Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone* (dibimbing oleh Muhammad Asdar dan Muhammad Idrus Taba).

Penelitian ini bertujuan (1) mengetahui peran pemuda desa Bana kecamatan Bontocani Kabupaten Bone dalam pembangunan desa serta untuk mengetahui dampak dari keterlibatan pemuda dalam pembangunan desa dan (2) mengetahui sinergitas antara pemerintah desa dengan pemuda desa Bana kecamatan Bontocani Kabupaten Bone dalam pembangunan desa di era millenial.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Bana Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone. Metode yang digunakan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan (1) peran pemuda dalam pembangunan masyarakat pedesaan memperlihatkan fungsi sosial (pembangunan desa) dan (2) sinergitas pemerintah Desa Bana Kecamatan Bontocani dengan pemuda desa berjalan dengan baik, di dalam hal perekonomian, pembangunan dan sumberdaya.

Kata kunci : Desa, Pemberdayaan Pemuda, Sinergitas



ABSTRACT

NURHAN HENRIAWAN. *Village Development in the Millennial Era: Case Study of Youth Empowerment In Bana Village Bontocani District Bone Regency,* (supervised by **Muhammad Asdar** and **Muhammad Idrus Taba**).

This study aims to (1) to find out the role of Bana village Youth Empowerment in Bone District in village development and to find out the impact of youth involvement in village development; (2) to find out the synergies between the village government and the youth of Bana village in village development in the millennial era.

This research was conducted in Bana village Bontocani sub-district Bone regency. The method used in this research was qualitative descriptive analysis.

The results show (1) the role of youth in the development of rural communities demonstrating social functions (village development); (2) the synergy between the Bana village government and village youth is going well, in terms of economy, development, and resources.

Keywords: Village, Youth empowerment, Synergy



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Teoritis	11
1. Pemuda.....	11
2. Pemberdayaan.....	13
3. Sejarah Pembangunan Desa	15
4. Karakteristik Desa di Indonesia	19
5. Pembangunan Desa	24
B. Kerangka Teori	31
BAB III: METODE PENELITIAN.....	37
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Sumber Data.....	37
C. Teknik Pengumpulan Data	38
D. Lokasi Penelitian.....	38
E. Teknik Pengolahan Data	39
F. Defenisi Oprasional.....	42
1. Pemberdayaan Pemuda.....	42
2. Era Milenial	50
3. Pembangunan Desa	51

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN.....	54
A. Gambaran Lokasi Penelitian	54
1. Kecamatan Bontocani	54
2. Desa Bana	59
B. Deskripsi Informasi Peneliti.....	66
C. Pembahasan.....	66
1. Peran Pemuda Desa Bana Dalam Pembangunan Desa	70
2. Sinergitas Pemerintah Desa Bana Dengan Pemuda Desa Dalam Pembangunan Diera Milenial	76
BAB V: PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA.....	85
LAMPIRAN	90

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa dan negara serta pemerintah saat ini dalam rangka pembinaan bangsa. Pada hakekatnya adalah upaya sistematis dan terencana oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

Bagi Desa sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Program pembangunan Desa sebagai bagian dari upaya pembangunan daerah telah dilaksanakan sejak Repelita I. Program ini

terutama diarahkan pada peningkatan kemampuan sumberdaya manusia termasuk penciptaan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat peDesaan dalam memproduksi, mengolah dan memasarkan hasil produksinya, sehingga tercipta lapangan kerja dan pemerataan pendapatan.

Kegiatan pembangunan Desa yang dilaksanakan meliputi Bantuan Pembangunan Desa, Pengembangan Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP), Peningkatan Prakarsa dan Swadaya Masyarakat, Pemukiman Kembali Penduduk dan Penataan Desa, Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa, serta Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Kegiatan-kegiatan pembangunan tersebut telah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat peDesaan, membantu mengurangi jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah Desa dan menambah besarnya jumlah Desa swasembada.

Selin itu, Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1988 telah mengamanatkan bahwa pembangunan daerah perlu senantiasa ditingkatkan agar laju pertumbuhan semua daerah serta laju pertumbuhan wilayah peDesaan dan wilayah perkotaan semakin seimbang dan serasi sehingga pelaksanaan pembangunan nasional serta hasil-hasilnya makin merata di seluruh Indonesia.

Secara historis Desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan jauh sebelum negara Indonesia terbentuk. Sejarah perkembangan Desa-Desa di Indonesia telah mengalami perjalanan yang sangat panjang, bahkan lebih tua dari Republik Indonesia sendiri. Sebelum masa kolonial, di berbagai daerah telah dikenal kelompok masyarakat yang bermukim di suatu wilayah atau daerah tertentu dengan ikatan kekerabatan atau keturunan.

Pola pemukiman berdasarkan keturunan atau ikatan emosional kekerabatan berkembang terus baik dalam ukuran maupun jumlah yang membentuk gugus atau kesatuan pemukiman. Pada masa itu, Desa merupakan kesatuan masyarakat kecil seperti sebuah rumah tangga besar, yang dipimpin oleh anggota keluarga yang paling dituakan atau dihormati berdasarkan garis keturunan. Pola hubungan dan tingkat komunikasi pada masa itu masih sangat rendah, terutama di daerah perDesaan terpencil dan pedalaman. Namun di pulau Jawa proses itu terjadi cukup cepat dan lebih baik dibanding dengan apa yang terjadi di pulau lainnya, sehingga perkembangan masyarakat yang disebut Desa lebih cepat mengalami perubahan.

Bagi Desa sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa,

pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah menempatkan posisi Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum adat sesuai dengan hak asal-usul Desa, sehingga otonomi Desa diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Posisi Desa sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan secara nasional dan merupakan garda terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan secara nasional, maka Desa diberi kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagai konsekwensi dari keberadaan Desa sebagai sebuah entitas pemerintahan (Yustika, 2015).

Undang-undang Desa telah memberikan kewenangan yang begitu besar kepada Desa yaitu: kewenangan berdasarkan hak asal-usul; kewenangan lokal berskala Desa; kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah Provinsi atau Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota; dan Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah Provinsi atau Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota (UU No.6 Tahun 2016 Tentang Desa).

Selain kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa, Desa juga diberikan kewenangan lain oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Kabupaten/ Kota, sebagaimana tertuang dalam pasal 22

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa (UU No.6 Tahun 2016 Tentang Desa).

Dalam mengawal aktualisasi UU No. 6 Tahun 2016 Tentang Desa maka adanya Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) oleh Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Program ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk itu, Undang-Undang ini menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu “Desa Membangun” dan “Membangun Desa” yang diintegrasikan dalam perencanaan Pembangunan Desa (UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa).

Sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan PP Nomor 43/2014 tentang Pelaksanaan UU Desa, salah satu elemen masyarakat yang dibutuhkan keterlibatannya yaitu Pemuda. Keterlibatan pemuda dalam membangun Desa itu sangat besar terutama dari segi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan (Rohmad,1998).

Menurut Senna (2016) peran pemuda dalam pembangunan sangat penting karena dianggap berada dalam usia yang produktif untuk

menunjang berbagai aktivitas pembangunan di berbagai sektor. Pemuda dapat menentukan arah kemajuan bangsa ke depan sehingga berbagai kebijakan harus dapat menunjang pemberdayaan pemuda agar lebih produktif dalam berbagai bidang. Salah satunya dalam aktualisasi pemuda di pedesaan banyak berperan dalam pembangunan masyarakat Desa. Tampak jelas peran pemuda yang dijalankan dari waktu ke waktu. Pemuda secara individual atau kolektif adalah faktor sentral dalam pembangunan masyarakat, karena ia bukan saja subjek pendukung, tetapi juga pencipta dan tujuan pembangunan masyarakat itu sendiri (Bernardi dalam Rohmad, 1998).

Kuntjaraningrat (1977) mendefinisikan Desa sebagai komunitas kecil yang menetap di suatu daerah, sedangkan Bergel (1995) mendefinisikan Desa sebagai setiap pemukiman para petani. Landis menguraikan pengertian Desa dalam tiga aspek yakni pertama analisis statistik, Desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan dengan penduduk kurang dari 2500 orang, kedua analisis sosial psikologis, Desa merupakan suatu lingkungan yang penduduknya memiliki hubungan akrab dan bersifat informal diantara sesama warganya, dan yang ketiga analisis ekonomi, Desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan dengan penduduknya tergantung kepada pertanian.

Di Indonesia penggunaan istilah tersebut digunakan dengan cara yang berbeda untuk masing-masing daerah, seperti dusun bagi masyarakat Sumatera Selatan, dati bagi Maluku, kuta untuk Batak, nagari

untuk Sumatera Barat, atau wanua di Minahasa. Bagi masyarakat lain istilah Desa memiliki keunikan tersendiri dan berkaitan erat dengan mata pencaharian, norma dan adat istiadat yang berlaku.

Dalam upaya pembangunan Desa ini, maka unsur kepemudaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Desa. Pembangunan Desa bukan hanya menjadi tugas tanggung jawab pemerintah saja tetapi seluruh elemen bangsa harus terlibat didalamnya. Kehadiran pemuda nantinya menjadi motor penggerak bagi kemajuan Desa melalui gagasan – gagasan yang diberikan dalam upaya pembangunan Desa baik secara fisik (infra struktur) maupun pembangunan sumber daya manusia dalam Desa.

Namun pada sisi realitas, kondisi Desa di beberapa wilayah di Indonesia masih cukup memprihatinkan walaupun telah mendapatkan bantuan anggaran yang jumlahnya begitu besar dari pemerintah pusat. Hal ini disebabkan kurangnya kualitas sumber daya manusia yang mampu mengelola dana Desa dalam upaya pembangunan Desa. Di sisi lain, keterlibatan pemuda dalam rangka membantu pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana Desa masih sangatlah minim dikarenakan kesadaran pemuda akan kemajuan Desa masih bersifat individual.

Oleh karena itulah, sinergitas antara pemerintah setempat dalam hal ini unsur pejabat Desa dengan pemuda sangatlah penting. Kehadiran

pemuda dengan gagasan ataukah ide tentang pembangunan Desa akan membantu pemerintah setempat dalam hal ini unsur pejabat Desa dalam penerapan pembangunan yang sifatnya untuk memajukan Desa.

Salah satu Desa yang menjadi titik fokus penelitian ini adalah Desa Bana di Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone Sulawesi Selatan. Desa ini menjadi objek penelitian akan potensi pemuda yang ada didalamnya mengingat kuantitas pemuda di Desa tersebut begitu besar.

Namun, kuantitas pemuda yang dimiliki oleh Desa Bana tersebut belum menjadi jaminan akan kemajuan Desa yang luasnya kurang lebih 69,16 Km ini. Hal ini dikarenakan adanya indikasi minimnya pemberdayaan dan pemanfaatan potensi pemuda dalam pembangunan Desa Bana di era millennial ini.

Indikasi inilah yang kemudian mengharuskan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui keterlibatan pemuda dalam pembangunan Desa di era millennial dengan mengangkat judul penelitian “Pembangunan Desa Dalam Era Millennial: Study Khusus Pemberdayaan Pemuda di Bana, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada proposal tesis ini adalah:

1. Bagaimanakah peran pemuda Desa Bana Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone dalam pembangunan?

2. Bagaimanakah sinergitas antara pemerintah Desa dengan pemuda Desa Bana Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone dalam pembangunan Desa di era millennial?

C. Tujuan Penelitian

Tinjauan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran pemuda Desa Bana Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone dalam pembangunan Desa serta untuk mengetahui dampak dari keterlibatan pemuda dalam pembangunan Desa.
2. Untuk mengetahui sinergitas antara pemerintah Desa dengan pemuda Desa Bana Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone dalam pembangunan Desa di era millennial.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat dari penelitian ini adalah dapat menjadi bahan bacaan dan acuan bagi kita semua untuk lebih mendalami tentang keterlibatan serta pemanfaatan pemuda oleh pejabat Desa Bana Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone dalam pembangunan Desa di era millennial.

Selain itu, tulisan ini juga nantinya dapat dikembangkan secara universal dalam hal kajian – kajian teoritik yang berhubungan

dengan pemuda dan keterlibatannya dalam pembangunan Desa.

2. Manfaat Praktis

Dalam konteks praktis, penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan untuk lebih optimal dalam mengamati peran pemuda dalam pembangunan Desa. Hal ini dianggap urgent mengingat potensi yang dimiliki pemuda dalam hal ide atau gagasan dalam rangka pembangunan dan pengembangan Desa.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teoritis

Kartodirdjo (1993:220) bahwa “dalam rangka menjelaskan gerakan sosial Islam dalam khasanah ilmu sosial memerlukan cara pandang untuk memahami dan menjelaskan masalah-masalah yang diteliti. Cara pandang atau perspektif dibangun di atas suatu teori yang akan dipergunakan untuk menganalisis dan menjelaskan suatu objek yang menjadi kajian”.

1. Pemuda

Dalam kosakata Bahasa Indonesia, pemuda dikenal dengan sebutan generasi muda dan kaum muda yang memiliki terminologi secara beragam. Secara sosiologis, istilah kaum muda pertama kali diperkenalkan oleh Abdul Rivai pada tahun 1905 pada Majalah Bintang Hindia No.147. Kaum muda didefinisikan sebagai seluruh rakyat Hindia (muda atau tua) yang tidak lagi bersedia mengikuti aturan kuno, sebaiknya mereka berkehendak untuk memuliakan harga diri melalui pengetahuan dan ilmu. Sejak saat itu istilah kaum muda digunakan secara luas dalam liputan media dan wacana publik oleh kaum muda terdidik. Arti kaum muda dijadikan simbol eksistensial sebuah entitas kolektif yang berbagi titik kebersamaan dalam ambisi untuk memperbaharui masyarakat Hindia melalui jalur kemajuan.

Sejarawan Indonesia, Taufik Abdullah, menyebutkan pemuda atau generasi muda adalah konsep yang sering dibentuk oleh nilai-nilai. Maknanya bukan istilah ilmiah, tetapi lebih pada pengertian ideologis, “pemuda sebagai harapan bangsa”, “pemuda harus dibina”. Semuanya memperlihatkan saratnya nilai-nilai yang melekat pada kata pemuda. Sedangkan arti sosiologis dan sejarah lebih menekankan kepada nilai subjektifnya, dimana kepemudaan dirumuskan berdasarkan tanggapan masyarakat dan kesamaan pengalaman historitas.

Pemuda tidak bisa hanya didefinisikan dari aspek demografis, namun juga sangat penting melihat dari aspek psikologis. Bayu Sutikno menyatakan bahwa pemuda adalah siapa saja yang “berjiwa dan berpikiran muda”. Jadi, seseorang yang berusia 20 tahun atau bahkan kurang dari 20 tahun, namun pola pikirnya selalu pro status quo, maka status kepemudaannya perlu dikaji ulang atau dipertanyakan (Oktarina Maharani, *Demokrasi dan Kepemimpinan Pemuda Indonesia* (Jurnal DEBAT vol I No. 1, 2009)). Kriteria pemuda yang dimaksud ada pada batasan usia dan semangat yang menunjukkan sikap anti status quo serta kontra terhadap kemapanan.

Namun istilah pemuda atau generasi muda dari aspek biologis merupakan konsep yang paling umum dipakai untuk memberi generalisasi. Golongan masyarakat yang berada pada usia paling

dinamis, yang membedakan dari kelompok umur anak-anak dan golongan tua. Hal tersebut yang digunakan sebagai acuan dalam undang-undang kepemudaan. Dalam Undang-undang No. 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan disebutkan bahwa pemuda adalah “warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.”

2. Pemberdayaan

Dalam kosakata Bahasa Indonesia, pemuda dikenal dengan sebutan generasi muda dan kaum muda yang memiliki terminologi secara beragam. Secara sosiologis, istilah kaum muda pertama kali diperkenalkan oleh Abdul Rivai pada tahun 1905 pada Majalah Bintang Hindia No.147. Kaum muda didefinisikan sebagai seluruh rakyat Hindia (muda atau tua) yang tidak lagi bersedia mengikuti aturan kuno, sebaiknya mereka berkehendak untuk memuliakan harga diri melalui pengetahuan dan ilmu. Sejak saat itu istilah kaum muda digunakan secara luas dalam liputan media dan wacana publik oleh kaum muda terdidik. Arti kaum muda dijadikan simbol eksistensial sebuah entitas kolektif yang berbagi titik kebersamaan dalam ambisi untuk memperbaharui masyarakat Hindia melalui jalur kemajuan.

Sejarawan Indonesia, Taufik Abdullah, menyebutkan pemuda atau generasi muda adalah konsep yang sering dibentuk oleh nilai-

nilai. Maknanya bukan istilah ilmiah, tetapi lebih pada pengertian ideologis, “pemuda sebagai harapan bangsa”, “pemuda harus dibina”. Semuanya memperlihatkan saratnya nilai-nilai yang melekat pada kata pemuda. Sedangkan arti sosiologis dan sejarah lebih menekankan kepada nilai subjektifnya, dimana kepemudaan dirumuskan berdasarkan tanggapan masyarakat dan kesamaan pengalaman historitas.

Pemuda tidak bisa hanya didefinisikan dari aspek demografis, namun juga sangat penting melihat dari aspek psikologis. Bayu Sutikno menyatakan bahwa pemuda adalah siapa saja yang “berjiwa dan berpikiran muda”. Jadi, seseorang yang berusia 20 tahun atau bahkan kurang dari 20 tahun, namun pola pikirnya selalu pro status quo, maka status kepemudaannya perlu dikaji ulang atau dipertanyakan (Oktarina Maharani, *Demokrasi dan Kepemimpinan Pemuda Indonesia* (Jurnal DEBAT vol I No. 1, 2009)). Kriteria pemuda yang dimaksud ada pada batasan usia dan semangat yang menunjukkan sikap anti status quo serta kontra terhadap kemapanan.

Namun istilah pemuda atau generasi muda dari aspek biologis merupakan konsep yang paling umum dipakai untuk memberi generalisasi. Golongan masyarakat yang berada pada usia paling dinamis, yang membedakan dari kelompok umur anak-anak dan golongan tua. Hal tersebut yang digunakan sebagai acuan dalam

undang-undang kepemudaan. Dalam Undang-undang No. 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan disebutkan bahwa pemuda adalah “warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.”

3. Sejarah Pembangunan Desa

Kata “Desa” sendiri berasal dari bahasa India yakni “swadesi” yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas (Soetardjo, 1984:15, Yuliati, 2003:24).

Menurut defenisi umum, Desa adalah sebuah aglomerasi permukiman di wilayah perDesaan (Hardjatno, 2007). Di Indonesia, istilah Desa adalah pembagian wilayah administrative di bawah Kecamatan, yang dipimpin oleh kepala Desa. Menurut Poerwadarminta (1976) Desa adalah sekelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan, kampong (di luar kota) dusun atau udik (dalam arti daerah pedalaman sebagai lawan dari kota).

Berdasarkan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, di mana Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan

dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat yang bertempat tinggal sejumlah manusia yang berhak mengatur dirinya sendiri, merupakan organisasi masyarakat hukum paling tua, mendahului masyarakat hukum sebelum negara ini merdeka. Desa mengandung unsur asli sebagai warisan nenek moyang dengan beragam budaya yang menghiasinya. Upaya mengatur dan menyelenggarakan Desa ditandai dengan penentuan kepala atau pimpinan Desa mereka sendiri. Corak yang beragam dalam menentukan kepala atau pimpinan Desa menjadi ciri khas kepala Desa di Indonesia.

Desa di Indonesia pertama kali ditemukan oleh Mr. Herman Warner Muntinghe, seorang Belanda anggota Raad van Indie pada masa penjajahan kolonial Inggris, yang merupakan pembantu Gubernur Jenderal Inggris yang berkuasa pada tahun 1811 di Indonesia. Dalam sebuah laporannya tertanggal 14 Juli 1817 kepada pemerintahnya disebutkan tentang adanya Desa-Desa di daerah - daerah pesisir utara Pulau Jawa. Dan dikemudian hari ditemukan juga Desa-desa di kepulauan luar Jawa yang kurang lebih sama dengan Desa yang ada di Jawa.

Terbentuknya suatu Desa tidak terlepas dari insting manusia, yang secara naluriah ingin hidup bersama keluarga suami/ istri dan anak, serta sanak familinya, yang kemudian lazimnya memilih suatu

tempat kediaman bersama. Tempat kediaman tersebut dapat berupa suatu wilayah dengan berpindah-pindah terutama terjadi pada kawasan tertentu hutan atau areal lahan yang masih memungkinkan keluarga tersebut berpindah-pindah.

Hal ini masih dapat ditemukan pada beberapa suku asli di Sumatera seperti kubu, suku anak dalam, beberapa warga melayu asli, juga di pulau-pulau lainnya di Nusa Tenggara, Kalimantan dan Papua. Setidaknya ada tiga alasan pokok dari semula orang-orang membentuk masyarakat adalah (Kartohadikoesoemo, 1965): pertama adalah untuk hidup, yaitu mencari makan, pakaian dan perumahan; kedua adalah untuk mempertahankan hidupnya terhadap berbagai ancaman dari luar; dan yang ketiga adalah untuk mencapai kemajuan dalam hidupnya.

Desa pertanian merupakan gejala Desa pertama-tama dibentuk, setelah membuka hutan dan mengolah lahan untuk ditanami tumbuhan yang menghasilkan makanan dan bahan kebutuhan lainnya. Di tepi laut dan sungai-sungai besar terbentuk Desa perikanan dan pelayaran (masyarakat pesisir) yang mendapat pencahariannya dari menangkap ikan, tambak dan jasa pelayaran.

Fakta sejarah menunjukkan bahwa dari abad ke abad Desa telah berkembang menjadi kesatuan hukum yang melindungi kepentingan bersama atas penduduknya dilindungi dan dikembangkan menurut ketentuan hukum adat setempat. Hukum itu

memuat dua hal, yaitu: pertama adalah hak untuk mengurus daerahnya sendiri, yang kemudian dikenal istilah hak otonomi dan yang kedua adalah hak memilih kepala Desanya sendiri.

Di masa lalu hak otonomi itu mencakup banyak aspek, seperti hukum kekerabatan, hukum waris, hukum tanah, hukum perdata, dan hukum pidana pun termasuk di dalamnya. Antara otonomi Desa di Jawa, Madura, dan Bali dengan Desa lain bias saja berbeda, misalnya di Sumatera Barat dikenal istilah Desa ini dengan wilayah “nagari” yang mempunyai hukum adat yang berbeda dalam hal hak otonomi tersebut. (sumardjo, 2010).

Desa pasar (jasa) tumbuh di sekitar tempat orang-orang bertemu satu sama lain untuk bertransaksi (di era modern disebut jual beli), sehingga terjadilah sebuah pasar yang terbentuk oleh masyarakat sekelilingnya. Di sekitar pasar tersebut kemudian berkembang menjadi Desa perdagangan (jasa). Kadang - kadang alasan terbentuknya Desa tercantum dalam nama Desa, dari nama Desa dapat diketahui alasan terbentuknya suatu masyarakat Desa tertentu (Kartohadikoesoemo, 1965).

Sejak diberlakukannya otonomi daerah istilah Desa dapat disebut dengan nama lain, misalnya di Sumatera Barat disebut dengan istilah nagari, di Aceh dengan istilah gampong, di Papua dan Kutai Barat, Kalimantan Timur disebut dengan istilah kampung, di Yogyakarta disebut dusun dan di Bali disebut banjar serta di

Sulawesi Selatan disebut kampung. Begitu pula segala istilah dan institusi di Desa dapat disebut dengan nama lain sesuai dengan karakteristik adat istiadat Desa tersebut. Hal ini merupakan salah satu pengakuan dan penghormatan Pemerintah terhadap asal usul dan adat istiadat setempat.

4. Karakteristik Desa di Indonesia

Di Indonesia, wilayah yang disebut Desa seharusnya dilihat dalam tahapan yang tidak sama. Masyarakat yang telah mulai menetap juga memiliki karakteristik yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain, antara Jawa dengan luar Jawa, antara Desa dekat kota dengan Desa yang jauh dari kota, antara wilayah dataran tinggi dengan dataran rendah, demikian pula antara pantai dan pedalaman.

Di Indonesia kelihatannya belum ada kajian mendalam tentang hal ini. Secara umum masyarakat yang telah mulai menetap yang disebut dengan Desa, istilah sebutannya sangat beragam di berbagai suku bangsa. Di Jawa disebut Desa, di Aceh disebut Gapong, di Papua disebut kampung dan masih banyak berbagai istilah tentangnya. Sangatlah penting mengklasifikasikan penduduk yang telah mulai menetap. Kalau digolongkan menurut sistem produksinya, ada penduduk Desa yang digolongkan dengan Desa subsistensi.

Desa merupakan bentukan dan pengembangan konsep asli bangsa Indonesia, meskipun ada kemiripan dengan Desa di India

yang bernuansa Hindu. Kehidupan masyarakat Desa terikat pada nilai-nilai budaya asli yang sudah diwariskan secara turun menurun dan melalui proses adaptasi yang sangat panjang dari interaksi intensif dengan perubahan lingkungan biofisik masyarakat. Kearifan lokal merupakan salah satu aspek karakteristik masyarakat, yang terbentuk melalui proses adaptasi yang kondusif bagi kehidupan masyarakat, sehingga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya seyogyanya dipahami sebagai dasar dalam pembangunan pertanian dan peDesaan (sumardjo,2010).

Kondisi masyarakat perDesaan di Indonesia pada saat ini sangat beragam, mulai dari perilaku berladang berpindah, bertani menetap, Desa industri, Desa dengan mata pencaharian dominan sektor jasa sampai Desa yang dengan fasilitas modern (semi urban dan urban) dapat ditemukan di wilayah Indonesia di era milenium ini.

Terkait dengan Desa terungkap bahwa norma-norma daerah hukum masyarakat itu menurut hukum adat:

1. Berhak mempunyai wilayah sendiri yang ditentukan oleh batas-batas yang sah.
2. Berhak mengurus dan mengatur pemerintahan dan rumah tangganya sendiri.
3. Berhak mengangkat pimpinan atau majelis pemerintahannya sendiri.

4. Berhak memiliki harta benda dan sumber keuangannya sendiri.
5. Berhak atas tanahnya sendiri.
6. Berhak memungut pajak sendiri.

Atas dasar prinsip-prinsip tersebut terdapat keberagaman hukum asli di masing-masing Desa yang tersebar di seluruh nusantara ini. Desa mengandung sejumlah kearifan-kearifan lokal (local wisdom) yang apabila dicermati nilai yang terkandung dalam kearifan tersebut maka dapat menjadi suatu kekuatan untuk beradaptasi dengan lingkungan dimana suatu masyarakat berdomisili di suatu wilayah Desa.

Kearifan tersebut dapat dicermati dari aturan-aturan, norma, tata krama/ tata susila, bahasa, kelembagaan, nama dan gelaran, teknologi yang digunakan (konstruksi rumah, tata letak rumah, teknik irigasi, teknik pengolahan tanah dan peralatannya, teknik membuat jalan/ jembatan, teknik perahu dan sebagainya). Sekiranya nilai (value) yang terkandung di dalam aspek-aspek tersebut diperhatikan dalam pengembangan teknologi di era modern ini, meski menggunakan bahan yang mungkin berbeda, maka keserasian lingkungan dan daya adaptasi tampaknya menjadi tetap tinggi.

Infrastruktur itu alat penting bagi kemajuan perkembangan masyarakat Desa, namun masyarakat paham arti pentingnya

infrastruktur itu jauh lebih penting sebab orang akan bertindak dengan alat yang dimilikinya karena mereka mengetahui arti pentingnya alat yang dimiliki. Meskipun infrastuktur perDesaan banyak ditemui di Desa, pertanyaannya apakah infrastuktur yang ada telah dipahami arti pentingnya bagi kehidupan masyarakat perDesaan.

Data statistik tentangnya seperti jalan Desa, gedung SD, Polindes (Poliklinik Desa), kantor pemerintah Desa, kendaraan umum dan infrastuktur lainnya, dapat ditemukan dengan mudah. Jika dilihat dari jumlah yang ada maka penyebaran infrastuktur tidak merata antarDesa di Jawa, apalagi dibandingkan dengan Desa di luar Jawa. Pembangunan infrastuktur buka sekedar ada dan menyebarkan secara merata tentang pengadaannya, akan tetapi perlu analisis infrastuktur mana yang paling penting bagi Desa dengan tipologi tertentu, seberapa besar jumlah yang harus dibutuhkan (susetiawan,2010).

Infrastuktur pendidikan perDesaan seperti gedung SD harus menjadi perhatian utama. Kurang nya gedung SD dan kalau toh ada kualitas bangunan yang ada sangat buruk mudah rusak bahkan ambruk. Dalam waktu yang singkat barangkali Jawa tidak banyak membutuhkan infrastuktur itu, akan tetapi bagaimana pemeliharaan infrastuktur tersebut. Luar Jawa keadaanya tidak hanya pada pengadaan infrastuktur bangunan gedung sekolah akan tetapi

tenaga pengajar akan siap melayani pendidikan di pelosok Desa pedalaman jauh lebih penting untuk diperhatikan.

Kesehatan dan Gizi masyarakat harus dilihat pada tipologi Desa macam apa. Desa menetap dan berbudidaya di mana penduduknya kreatif, ada pertanian yang maju dan ada industri perDesaan yang berkembang, mereka tidak kesulitan untuk memenuhi gizi. Bagi masyarakat yang telah memiliki pengetahuan pemenuhan gizi tidak menjadi problematik. Ini terutama dapat dilihat di Desa di Jawa. Desa lain yang berada di luar Jawa juga tidak bisa dilihat secara kuantitatif semata akan tetapi juga harus dilihat dari sifat kualitatif penyelenggaraan kesehatan dan gizi.

Keadaan seperti itu perlu dilihat lebih teliti Desa mana yang mengalami tingkat kesehatan rendah dan kekurangan gizi. Bagi masyarakat Desa yang telah menetap lama sebagai masyarakat Desa persoalan ini sudah tidak menjadi persoalan serius. Karakteristik wilayah perDesaan sangat berbeda tipologinya baik karakteristik sosial budaya, keadaan infrasturkur yang ada, keadaan di wilayah perDesaan, tingkat kesehatan dan gizi sampai dengan karakteristik kondisi kemiskinannya. Tipologi Desa seharusnya mempertimbangkan keadaan yang berbeda antar masyarakat di Jawa antara Jawa dan luar Jawa.

Kerumitan tipologi dan karakteristik ini tidak mungkin digeneralisasikan dalam proses pembangunan. Oleh sebab itu,

desentralisasi menjadi prinsip utama dalam proses pembangunan agar pembangunan lebih cepat untuk menjawab kebutuhan masyarakat perDesaan.

5. Pembangunan Desa

Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa dalam upaya mendukung implementasi Undang - Undang Desa, perlu melibatkan semua unsur kelompok masyarakat Desa, salah satunya adalah pemuda. Merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam seluruh proses berDesa sebagai wujud dari pengakuan atas rekognisi dan subsidiaritas Desa dalam melaksanakan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

Pemuda menyimpan potensi besar untuk memimpin pembangunan di Desa. Mereka dapat menjadi kunci keberlanjutan pembangunan dengan pemikiran -pemikiran zaman now atau zaman millennial. Aktivitas pemuda saat ini, sangat dekat dengan kecepatan informasi dan perkembangan teknologi. Hal tersebut diyakini menjadi modal besar bagi para pemuda untuk peduli terhadap pembangunan di Desanya.

Selain itu lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pun menjadi dasar bahwa kini Desa adalah subjek pembangunan itu sendiri. Kegiatan dan kelembagaan kepemudaan Desa pun bisa menjadi media yang efektif untuk berkumpul, saling berbagi inspirasi, dan membuat kreatifitas.

Badan Pusat Statistik (BPS) nasional dalam situsnya menyebutkan bahwa hingga 2010 jumlah penduduk Indonesia ada di angka 237.641.236 jiwa. Sebuah angka yang kian tahun kian bertambah dan diperkirakan mencapai 252 juta jiwa. Bagi pisau bermata dua, kondisi ini bisa berpotensi saat kita mampu mengelolanya dengan baik, namun di saat yang sama bisa dipandang sebagai ancaman atau risiko ketika jumlah itu tidak diberdayakan dengan baik.

Menurut BPS, angka pertumbuhan jumlah penduduk miskin masih tinggi seiring pertumbuhan penduduk itu sendiri. Berdasarkan sebaran kemiskinan di kota dan Desa, angka kemiskinan di Desa jauh lebih besar daripada di kota. Pada 2011, 63,21% komposisi penduduk miskin ada di Desa yang artinya di kota ada 36,79% sisanya.

Persentase ini seakan menunjukkan hampir septengah dari penduduk miskin di Indonesia ada di Desa. Dalam berbagai sumber, dari sekitar 37 juta rakyat Indonesia yang miskin, 63,58% di antaranya adalah orang Desa dan 70% penduduk berprofesi sebagai petani. Maka dari itu membangun Desa, berdasarkan kajian data statistika tersebut sama halnya membereskan lebih dari separuh permasalahan kemiskinan di Indonesia.

Kemudian lebih lanjut kebutuhan rakyat Indonesia terutama di peDesaan terhadap regulasi yang lebih memihak kepentingan

mereka tidak bisa ditunda - tunda lagi. Pembangunan yang bias kota (lebih banyak berfokus di kota) harus dipertimbangkan kembali karena mayoritas rakyat Indonesia tinggal di perDesaan.

Selain sebagai pusat sebaran kependudukan, Desa adalah kantong utama kemiskinan dan keterbelakangan. Undang-Undang Pembangunan PerDesaan mengatasi kesimpangsiuran dan tabrakan antar berbagai peraturan perundang -undangan yang ada tentang Desa. Hal ini dikarenakan undang-undang ini diarahkan menjadi undang - undang induk pembangunan perDesaan yang komprehensif, lintas sektoral, terpadu, dan holistik.

Di sisi lain undang-undang ini tidak hanya membahas masalah pemerintahan Desa, melainkan juga masalah pembangunan Desa. Karenanya, Undang - Undang Pembangunan PerDesaan telah membahas sejumlah isu krusial yang selama ini menjadi pokok persoalan pembangunan perDesaan, yakni masalah kedudukan dan kewenangan Desa, perencanaan pembangunan Desa, keuangan Desa, alokasi anggaran dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional) dan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) untuk Desa, sumber-sumber ekonomi Desa, termasuk tata kelola sumberdaya alam, demokrasi, dan birokrasi Desa. Substansi undang-undang ini juga memuat sebuah Desain dan strategi baru pembangunan yang menempatkan Desa sebagai arus utama pembangunan nasional.

Masyarakat Desa diposisikan sebagai subjek pembangunan yang otonom dan berdaulat dalam menentukan nasib mereka sendiri dan bukan objek pembangunan seperti selama ini. Apalagi, lebih dari tiga dekade terakhir, pembangunan perDesaan di Indonesia belum direncanakan dalam suatu grand design yang utuh dan dilaksanakan melalui grand strategy yang terpadu.

Akibatnya, berbagai produk perundang - undangan yang terkait dengan perDesaan gagal menciptakan keseimbangan antara pembangunan perDesaan dan perkotaan serta antara daerah berkembang dan daerah tertinggal. Ini juga sejalan dengan janji Presiden RI periode 2014-2019 tentang konsentrasi mereka pada pembangunan Desa.

Undang - undang Pembangunan PeDesaan memang bukanlah solusi utama bagi pembangunan Desa, tetapi ia menjadi pintu masuk yang sangat strategis untuk mengawal perubahan Desa dari keterpurukan dan keterbelakangan seperti selama ini menuju Desa yang mandiri, demokratis, dan sejahtera.

Lebih jauh dari sekadar telah lahirnya undang-undang Desa No. 6 tahun 2014, peran pemuda terlebih mereka yang mendapat kesempatan belajar di pendidikan tinggi menjadi sangat krusial. Mereka yang telah mendapat amanah rakyat melalui APBN yang mensubsidi perjuangan belajar mereka di perguruan tinggi di berbagai daerah perlu sadar akan tanggung jawab ini.

Para lulusan perguruan tinggi hendaknya tidak menutup mata dengan keadaan sekitarnya, apalagi mereka yang berasal dari Desa. Sudah saatnya semua pemuda turun tangan dan menyingsingkan lengan baju mengambil peran dalam sebuah gerakan besar ini. Sebuah gerakan yang jika berhasil mampu mengatasi lebih dari 60% permasalahan kemiskinan di Indonesia. Sebuah gerakan yang pasti mampu meningkatkan kesejahteraan dan martabat bangsa kita.

Keterlibatan pemuda dalam pembangunan Desa dapat dilakukan dengan beberapa hal yaitu:

1. Melakukan kerjasama dengan pejabat Desa dalam hal ini komitmen pembangunan Desa dengan unsur – unsur pejabat Desa utamanya dengan kepala Desa.
2. Gagasan ataukah ide pemuda tentang peningkatan per kapita masyarakat Desa berdasarkan kondisi alam yang dimiliki Desa tersebut.
3. Memodernisasi Desa seperti melakukan berbagai pelatihan kepada masyarakat Desa yang sifatnya untuk memajukan Desa tersebut.
4. Keterlibatan pemuda bekerjasama dengan pemerintah Desa dalam peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat.
5. Keterlibatan pemuda dalam gerakan memajukan Desa melalui gerakan cinta Desa dan sebagainya.

6. Era Milenial

Istilah “era millennial” bisa dikatakan periode keemasan generasi millennial, memang sudah akrab kita dengar. Istilah tersebut berasal dari ‘Millenials’ yang diciptakan oleh dua pakar sejarah dan penulis Amerika, William Strauss dan Neil Howe dalam beberapa bukunya. Milenial generation atau generasi Y juga akrab disebut generation me atau echo boomers.

Secara harfiah, memang tidak ada demografi khusus dalam menentukan kelompok generasi yang satu ini. Beberapa ilmuwan dan pakar tetap menggolongkannya berdasarkan tahun lahir awal dan akhir. “Menurut para peneliti sosial, generasi Y atau Milenials ini lahir pada rentang tahun 1980an hingga 2000. Dengan kata lain, generasi Milenial ini adalah anak-anak muda yang saat ini berusia antara 15-35 tahun.”

Menurut U.S. Chamber of Commerce Foundation, generasi milenial atau Millennial Generation adalah generasi manusia yang lahir dengan rentang tahun antara 1980 – 1999 Masehi. Sedangkan manusia kelahiran tahun 2000 M sampai sekarang disebut dengan generasi Z atau Z Generation. Itulah yang dikutip dari jurnal ilmiah karya Nur Azizah Ilfatin (Universitas Negeri Surabaya).

Melalui berita tahun 2016, jumlah generasi milenial sejumlah 85 juta jiwa atau mencapai 34,45% dari total seluruh penduduk Indonesia. Data tersebut dilansir dari jurnal ilmiah yang disusun oleh

empat orang yaitu Anindia Indah Permata, Martinus Rosadi Nugroho, Elias Sugita Handoyo, Ivan Angga Kusuma, yang menyebutkan juga bahwa generasi ini akan mendominasi perekonomian di Indonesia sampai dengan jangka waktu 30 tahun mendatang.

Adapun perbedaan karakteristik seperti pola pikir, mobilitas yang tinggi, kecenderungan kurang penyabar, dan jiwa petualang merupakan satu hal yang membedakan generasi milenial dengan generasi sebelumnya. Hal ini pun turut dipengaruhi oleh penggunaan teknologi semenjak usia dini dan juga efek globalisasi.

Di tahun 2018 ini, generasi millennial yang dimaksud adalah orang-orang dengan kisaran sekarang berumur 18 sampai 38 tahun. Itu artinya, generasi milenial adalah generasi yang sedang mengalami masa keemasan sekarang.

Mengingat walaupun sebagian besar dari mereka masih menempuh pendidikannya di perguruan tinggi. Namun sebagian besarnya yang lain sudah mulai berkiprah di berbagai lini kehidupan masyarakat dan kenegaraan. Pada generasi millennial, pendidikan menjadi suatu hal yang penting dalam perjalanan hidupnya. Akan tetapi cara berpikir dan belajar sangat berbeda dengan generasi sebelumnya yang lebih sering belajar melalui lisan maupun pengalaman dari orang tua. Generasi millennial yang lebih menarik dan memiliki kecenderungan untuk dapat secara cepat dan tepat mengakomodasi kebutuhannya.

Dari sini, kita bisa simpulkan bahwa generasi millennial akan banyak menyerap banyak hal. Sekarang ini, generasi millennial merupakan generasi yang sudah memasuki masa yang paling produktifnya. Seperti yang dikutip dari suatu jurnal ilmiah, alasan dipilihnya responden diatas, adalah: generasi millennial adalah generasi dengan usia produktif, rentang usia 18 s.d. 35 tahun dianggap sebagai usia dengan tingkat kemandirian dan kebebasan dalam menentukan pilihan yang tinggi.

Pada tahun 2018 ini, merupakan era keemasan dari generasi millennial dan merupakan bibit dari generasi penerus bangsa yang sedang duduk di jenjang sekolah-sekolah yaitu SD, SMP, dan SMA/Sederajat.

B. Kerangka Teori

Pembangunan peDesaan merupakan salah satu titik berat pembangunan Indonesia, karena sebagian besar masyarakat Indonesia tinggal di peDesaan. Namun demikian hingga saat ini masih terjadi kesenjangan antar wilayah, baik antar wilayah peDesaan maupun antar Desa dan kota. Berbagai upaya untuk mengatasi kesenjangan antar wilayah telah lama dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan dan program nasional.

Dimulai pada tahun 1994, pemerintah menjalankan Program Inpres Desa Tertinggal (IDT) yang kemudian dilanjutkan dengan program-

program lainnya. Program-program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat lainnya adalah: PPK (Program Pengembangan Kecamatan) yang dilaksanakan Departemen Dalam Negeri, P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan) yang dilaksanakan Departemen Pekerjaan Umum, P4K (Proyek Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil) yang dilaksanakan Departemen Pertanian, PEMP (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir) yang dilaksanakan Departemen Kelautan dan Perikanan, KUBE (Kelompok Usaha Bersama) yang dilaksanakan Departemen Sosial, dan lain-lain.

Program-program tersebut berjalan sendiri - sendiri menurut kebijakan Departemen yang bersangkutan, tidak terintegrasi, parsial dan sektoral (Hadi, 2007). Kemudian sejak tahun 1998 beberapa perubahan paradigma yang mendasar telah terjadi di Indonesia, seperti desentralisasi, reformasi Universitas Sumatera Utarasistem keuangan negara dan sistem perencanaan pembangunan nasional, yang mempengaruhi seluruh pelaksanaan program pemerintah, termasuk program mengatasi kesenjangan antar wilayah (Indratno, 2006).

Sesuai dengan perubahan tersebut, pemerintah mengembangkan suatu program dalam melakukan pengurangan kesenjangan antar wilayah, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan tingkat pengangguran terbuka serta juga meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan desentralisasi pembangunan dan otonomi daerah. Program ini merupakan kelanjutan dan penyempurnaan dari

program sebelumnya, yaitu Pengembangan Prasarana PerDesaan (P2D), dan disebut sebagai program Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) (Departemen PU, 2008).

Dalam operasionalnya, PNPM - PISEW terdiri dari enam kategori kegiatan, yaitu: pengembangan wilayah (kategori I), kegiatan penunjang peningkatan produksi pertanian (kategori II), prasarana pendukung peningkatan pemasaran pertanian (kategori III), prasarana air bersih dan lingkungan (kategori IV), prasarana pendukung pendidikan (kategori V), dan prasarana pendukung kesehatan (kategori VI).

Keenam kategori tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok utama kegiatan, yaitu: pengembangan infrastruktur Desa, kegiatan penunjang produksi pertanian, dan prasarana pendukung (dalam hal ini air bersih dan sanitasi lingkungan, pendidikan dan kesehatan).

Kurang lancarnya aksesibilitas ke pusat bisnis, fasilitas umum dan pusat kegiatan masyarakat merupakan masalah utama bagi sebagian masyarakat miskin di peDesaan. Perbaikan aksesibilitas daerah peDesaan tidak hanya memperbaiki hubungan ke pusat bisnis, tetapi juga akan memperbaiki komunikasi melalui suatu jaringan. Secara umum ini berarti biaya yang lebih rendah untuk mendapatkan barang, untuk menuju daerah peDesaan, juga untuk menuju keluar dari daerah peDesaan, sehingga memudahkan hubungan antar daerah.

Transportasi yang baik ke daerah peDesaan juga akan memudahkan bagi mereka yang tinggal di Desa dan bekerja di kota untuk pulang balik kerja, tanpa harus berpindah ke kota. Dengan dibangunnya sarana transportasi (dalam hal ini infrastruktur Desa), kegiatan ekonomi masyarakat, pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam pembangunan pada kawasan yang mempunyai potensi ekonomi tinggi akan lebih mudah dikembangkan. Kegiatan ekonomi masyarakat ini akan berkembang apabila mempunyai prasarana dan sarana transportasi yang baik untuk aksesibilitas. Aksesibilitas ini dapat memacu proses interaksi antar wilayah sampai ke daerah yang paling terpencil sehingga tercipta pemerataan pembangunan (Kirmanto, 2005).

Peran pemuda pun sangat menunjang dalam upaya pembangunan dan pengembangan Desa. Apalagi era sekarang semakin canggih disertai perkembangan teknologi mengharuskan masyarakat termasuk yang tinggal di peDesaan memasuki era tersebut. Kecepatan akses yang kini telah memasuki generasi ke empat mestinya berpengaruh besar terhadap pembangunan dan pengembangan Desa di Indonesia.

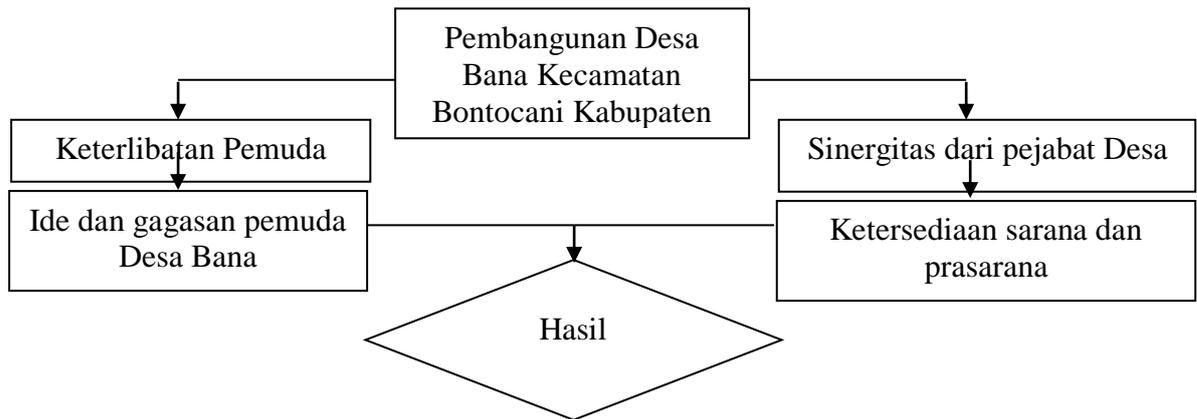
Oleh karena itulah, kehadiran pemuda di era millennial ini sangatlah penting sebagai bagian dari pembangunan Desa. Kemampuan pemuda dalam memahami perkembangan zaman menjadi modal besar dan dapat diterapkan dalam pembangunan Desa.

Oleh karena itulah, dibutuhkan sinergitas antara pemuda, pejabat Desa hingga masyarakat Desa untuk berkolaborasi melakukan

pengembangan dan pembangunan Desa. Pemberdayaan pemuda dalam pembangunan Desa di era millennial sangatlah penting dan akan semakin memudahkan kepala Desa beserta jajarannya untuk semakin mensejahterahkan masyarakatnya dengan gagasan – gagasan yang bersumber dari pemuda.

Desa Bana Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone dalam segi kuantitas pemuda sangatlah besar. Potensi pemuda untuk membangun Desa Bana menjadi modal tersendiri yang dimiliki Desa tersebut. Namun, keterlibatan para pemuda ini nantinya membutuhkan support dan dukungan dari pejabat Desa utamanya dukungan dari kepala Desa.

Hal yang mendasar dari keterlibatan pemuda dalam membangun Desa Bana ini adalah sarana dan prasarana yang menjadi kebutuhan dasar mereka. Hal ini pun mesti menjadi hal yang utama mengingat gagasan dan ide yang dikembangkan pemuda dalam pembangunan Desa Bana membutuhkan dukungan penuh dari pejabat Desa setempat. Oleh karena itulah, pemberdayaan pemuda dalam pembangunan Desa Bana ini memerlukan dukungan besar agar pembangunan Desa dapat berjalan secara optimal. Untuk memahami alur kerangka teori diatas, dapat dilihat dari bagan dibawah ini.



Gambar 1.1: gambar bagan pembanguna study pemberdayaan pemuda dalam pembangunan Desa Bana Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone

BAB III: METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Menurut Bogdan Taylor mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat di amati. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain.

Selain itu, jenis yang digunakan dalam peneltian ini adalah jenis deskriptif, yaitu yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, akurat mengenai fakta-fakta, fenomena dan sifat-sifat yang terjadi dan yang belum terjadi mengenai kehidupan sekelompok sosial dan individu, suatu objek, populasi tertentu dan suatu peristiwa yang terjadi.

B. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder (Sugiyono, 2014:137).

Sumber data dalam penelitian kualitatif, sebagai berikut:

1. Data primer merupakan data yang di peroleh langsung oleh peneliti dari sumber penelitian dengan melakukan observasi dan wawancara langsung dengan subjek penelitian.
2. Data sekunder adalah data yang di peroleh secara tidak langsung seperti melalui buku, literatur, jurnal, dokumen, maupun data-data berita online (internet) yang berkaitan dengan judul penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data kualitatif menggunakan metode pengamatan yang umumnya digunakan dari tradisi kualitatif seperti wawancara, observasi partisipan/kelompok, serta diskusi terfokus. (Bungin, 2007:126) Hal lain yang tak kalah penting adalah literatur dan dokumentasi yang terkait objek kajian.

Dalam penelitian ini penulis mewawancarai:

1. Kepala Desa Bana Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone.
2. Tokoh Pemuda Desa Bana Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone.
3. Tokoh masyarakat Desa Bana Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone.

D. Lokasi Penelitian

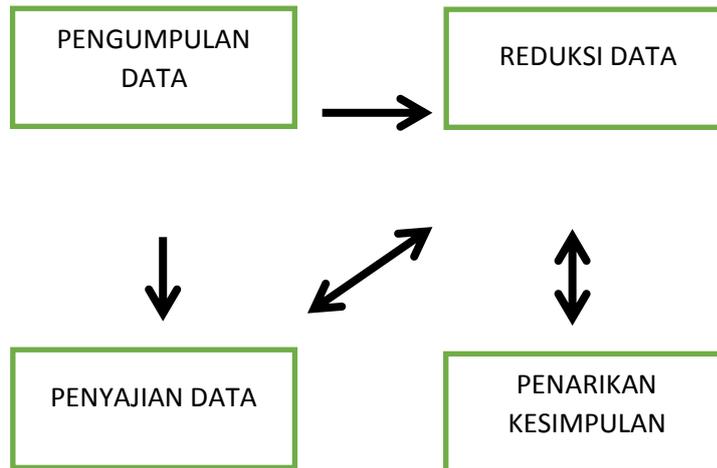
Lokasi penelitian akan di lakukan di Desa Bana Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan.

E. Teknik Pengolaan Data

Teknik Analisa Data merupakan pengkajian literatur atau pengamatan pada fenomena, kategorisasi, menelusuri kategorisasi, menjelaskan hubungan kategorisasi, menarik kesimpulan, serta membangun teori. (Bungin, 2007:144).

Sesuai dengan jenis data penelitian ini, data diolah dengan menggunakan tehnik analisis *non statistic* atau analisis data kualitatif, yaitu mempelajari data yang akan diteliti secara mendasar dan mendalam. Langkah-langkah dalam analisis tehnik non statistik ini adalah : Pertama, klasifikasi data, yaitu menggolongkan aneka ragam data ke dalam kategori-kategori yang jumlahnya lebih terbatas. Secara teknik kategori-kategori tersebut harus disusun berdasarkan kriteria yang lengkap, sehingga tidak ada satu pun yang tidak mendapat tempat serta kategori satu dengan yang lain terpisah secara jelas dan tidak saling tumpang tindih. Kedua, mengklasifikasikan data tersebut dengan memberi tanda sesuai dengan data yang dibutuhkan. Ketiga, memeriksa keabsahan data. Keempat, penafsiran data dalam mengolah hasil sementara menjadi teori substansif, dan Ketujuh, penarikan kesimpulan.

Adapun tahapan analisis data menggunakan model analisis interaktif yang di kemukakan oleh Miles dan Huberman (1984). Analisis data model interaktif : Miles and Huberman (1984 dalam syahrudin, 2010).



Gambar 2.1. Teknik pengumpulan data.

1. Pengumpulan Data.

Pengumpulan data adalah memeriksa data yang terkumpul berkenaan dengan kelengkapan-kelengkapan dan kebenaran sehingga siap untuk diproses lebih lanjut. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.

2. Reduksi Data

Reduksi Data dalam analisis data penelitian kualitatif, menurut Miles dan Huberman (1992:16) sebagaimana di tulis Malik diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung.

3. Penyajian Data

Sajian data pada dasarnya terdiri dari hasil analisis data yang berupa cerita rinci para informan sesuai dengan ungkapan atau pandangan mereka apa adanya (termasuk hasil observasi) tanpa ada komentar, evaluasi dan interpretasi dan berupa pembahasan yakni diskusi antara data temuan dengan teori-teori yang digunakan (kajian teoritik atas data temuan). Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat reduksi data untuk dikelola lebih lanjut sehingga pada akhirnya akan menghasilkan suatu kesimpulan. Setelah dapat di peroleh berupa tulisan baik dari catatan maupun rekaman yang sudah di reduks, harus di display secara tertentu untuk masing-masing pola,kategori, fokus, atau tema yang hendak di pahami dan di mengerti.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan penilaian apakah sebuah hipotesis yang diajukan itu di tolak atau di terima.Penarikan kesimpulan dalam melakukan penelitian ilmiah merupakan intisari dari hasil eksperimen dan pernyataan mengenai hubungan hasil eksperimen dengan hipotesis, termasuk juga alasan-alasan yang menyebabkan hasil eksperimen berbeda dengan hipotesis. Penarikan kesimpulan

seharusnya ringkas saja, sebagaimana gambaran pada publikasi hasil penelitian bagian kesimpulan mencakup keseluruhan laporan. Setelah peneliti menarik kesimpulan dari hasil penelitian, peneliti harus memahami dan mempelajari kembali data-data hasil penelitian, meminta pertimbangan kepada pihak mengenai data-data yang di peroleh di lapangan.

F. Defenisi Oprasional

Adapun yang menjadi obyek penelitian ini adalah variabel peranan pemuda (X) dan variabel pengembangan gerakan (Y). berkaitan dengan tujuan dan kegunaan penelitian sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, maka status variabel peranan pemuda ditetapkan sebagai variabel bebas (independent variable) yaitu merupakan variabel yang mempengaruhi. Sedangkan variabel pengembangan gerakan statusnya adalah sebagai variabel tergantung atau variabel yang dipengaruhi. Variabel merupakan suatu konsep yang bersifat abstrak, sehingga memerlukan penjelasan dengan cara tertentu sehingga menjadi variabel yang dapat diukur yang disebut dengan definisi operasional.

1. Pemberdayaan Pemuda

Pemberdayaan (*empower*) mengandung dua arti. pertama adalah *to give power or authority to*. kedua berarti *to give ability or enable*. pengertian pertama diartikan sebagai memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan, atau mendelegasikan otoritas kepihak lain.

sedangkan pengertian kedua, diartikan sebagai upaya untuk memberi kemampuan atau keberdayaan.

Mengutip definisi pemberdayaan dari ifz (1995 : 182) pemberdayaan berarti menyiapkan kepada masyarakat sumber daya, kesempatan / peluang, pengetahuan dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas diri masyarakat itu dalam menentukan masa depan mereka, serta untuk berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan dalam komunitas masyarakat itu sendiri.

Pengertian yang lebih luas, sebagaimana yang dikemukakan oleh pranarka dan moeljarto (1996:63) pemberdayaan disebutkan sebagai upaya menghormati kebhinekaan, kekhasan lokal, desentralisasi kekuatan dan peningkatan kemandirian, lebih lanjut dikatakan bahwa pemberdayaan berarti pembagian kekuasaan yang adil (*equitable sharing of power*) sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan kelompok yang lemah serta mempebesar pengaruh mereka terhadap proses dan hasil pembangunan.

Peranan merupakan proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya (Soekanto, 2009: 212-213).

Soekanto (2009:213) mengatakan peranan mencakup tiga hal, antara lain yaitu yang pertama Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Kedua, Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Ketiga, Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Sedangkan menurut Biddle dan Thomas, peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Misalnya dalam keluarga, perilaku ibu dalam keluarga diharapkan bisa memberi anjuran, memberi penilaian, memberi sanksi dan lain-lain (Novianty, 2016 : 16).

Adapun makna dari kata “peran” dapat dijelaskan lewat beberapa cara yaitu Suatu penjelasan historis menyebutkan, konsep peran semula dipinjam dari keluarga drama atau teater yang hidup subur pada jaman Yunani Kuno (Romawi). Dalam arti ini, peran menunjuk pada karakteristik yang disandang untuk dibawakan oleh seseorang actor dalam sebuah pentas drama. Suatu penjelasan yang menunjuk pada konotasi ilmu sosial, yang mengartikan peran sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki

suatu karakteristik (posisi) dalam struktur sosial. Suatu penjelasan yang lebih bersifat operasional menyebutkan bahwa peran seorang aktor adalah suatu batasan yang dirancang oleh aktor lain, yang kebetulan sama-sama berada dalam suatu batasan yang dirancang oleh actor lain, yang kebetulan sama-sama berada dalam satu “penampilan / unjuk peran (*role performance*)”.

Pada dasarnya ada dua paham yang dipergunakan dalam mengkaji teori peran yakni paham strukturalis dan paham interaksionis. Paham strukturalis lebih mengaitkan antara peran-peran sebagai unit kultural, serta mengacu ke perangkat hak dan kewajiban, yang secara normatif telah direncanakan oleh sistem budaya. Sistem budaya tersebut, menyediakan suatu sistem operasional, yang menunjuk pada suatu unit dan struktur sosial.

Kemudian peran dalam konsep struktur menonjolkan suatu kondisi pasif-statis, baik pada aspek permanensi maupun aspek saling kait antara posisi satu dengan lainnya. Paham interaksionis, lebih memperlihatkan konotasi aktif-dinamis dari fenomena peran tersebut merupakan suatu perwujudan peran (*role performance*), yang bersifat lebih hidup serta organis, sebagai unsur dari sistem sosial yang telah diinternalisasi oleh self dari individu pelaku peran. Dalam hal ini, pelaku peran menjadi sadar akan struktur sosial yang didudukinya. Karenanya ia berusaha untuk selalu nampak dan

dipersepsi oleh pelaku lainnya sebagai “tak menyimpang” dari harapan yang ada dalam masyarakatnya.

Tidak dapat dipungkiri perilaku seseorang sangat diwarnai oleh banyak faktor, serta persepsinya tentang faktor-faktor tersebut. Persepsi yang dimiliki itu pulalah yang turut menentukan bentuk sifat dan intensitas peranannya dalam kehidupan organisasional. Tidak dapat disangkal pula, bahwa manusia sangat berbeda-beda, seseorang dengan lainnya, baik dalam arti kebutuhannya, bagi kategori umum, maupun dalam niatnya yang kesemuanya tercermin dalam kepribadian masing-masing.

Keanekaragaman kepribadian itulah, justru yang menjadi salah satu tantangan yang paling berat untuk dihadapi oleh setiap pimpinan dan kemampuan menghadapi tantangan itu pulalah salah satu indikator terpenting, bukan saja daripada efektifitas kepemimpinan seseorang akan tetapi juga mengenai ketangguhan organisasi yang dipimpinnya. Karena demikian eratnya kaitan antara persepsi seseorang dengan kepribadian dan perilakunya, maka mutlak perlu bagi pimpinan organisasi untuk memahami dan mendalami persepsi bawahannya, baik yang menyangkut peranan bawahan tersebut dalam usaha pencapaian tujuan organisasi maupun mengenai berlangsungnya seluruh proses administrasi dan manajemen dalam organisasi yang bersangkutan.

Dari penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa peran adalah suatu pola sikap, nilai dan tujuan yang diharapkan dari seseorang yang berdasarkan posisinya dimasyarakat. Sementara posisi tersebut merupakan identifikasi dari status atau tempat seseorang dalam suatu sistem sosial dan merupakan perwujudan dan aktualisasi diri. Peran juga diartikan sebagai serangkaian perilaku yang diharapkan oleh lingkungan sosial berhubungan dengan fungsi individu dalam kelompok sosial.

Pemuda sebagai aset bangsa adalah hal yang tidak dapat kita pungkiri, sehingga tidak salah kemudian bahwa pemuda memiliki posisi strategis diberbagai bidang kehidupan sekaligus menjadi indikator maju mundurnya suatu bangsa. Bangsa yang besar bukanlah bangsa yang memiliki sumber daya alam yang melimpah tapi bangsa yang memiliki sumber daya manusia yang handal.

Menurut Mulyana (2011:1) mengemukakan bahwa Pemuda lebih dilihat pada jiwa yang dimiliki oleh seseorang. Jika orang tersebut memiliki jiwa yang suka memberontak, penuh inisiatif, kreatif, antikemapanan, serta ada tujuan lebih membangun kepribadian, maka orang tersebut dapat dikatakan sebagai pemuda.

Acuan yang kedua inilah yang pada masa lalu digunakan, sehingga pada saat itu terlihat bahwa organisasi pemuda itu lebih banyak dikendalikan oleh orang-orang yang secara usia sudah tidak muda lagi, tetapi mereka mempunyai jiwa pemuda. Oleh sebab itu

kelemahan dari pemikiran yang kedua itu organisasi kepemudaan yang seharusnya digunakan sebagai wadah untuk berkreasi dan mematangkan para pemuda dijadikan kendaraan politik, ekonomi, dan sosial untuk kepentingan perorangan dan kelompok.

Secara hukum Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun (UU Kepemudaan No. 40 Tahun 2009).

Lebih lanjut Mulyana (2011:1) mengemukakan bahwa selain didasarkan pada usia pemuda juga dapat dilihat dari sifat/jiwa yang mengiringinya. Jika didasarkan pada sifat maka pemuda mempunyai ciri-ciri yaitu Selalu ingin memberontak terhadap kemapanan. Hal ini lebih disebabkan karena pada usia ini seorang pemuda sedang mencari identitas diri. Keinginan untuk diakui dan ingin mendapatkan perhatian mendorong pemuda untuk berbuat sesuatu yang "tidak biasa-biasa saja dan sama dengan yang lain". Ditinjau dari sisi positif perilaku ini akan memunculkan kreatifitas, akan tetapi disisi lain akan muncul penentangan dari pihak lain khususnya pihak orang dewasa yang sudah mapan.

Bekerja keras dan pantang menyerah, Sifat kedua ini berhubungan erat dengan sifat pertama. Kerja keras dan pantang menyerah inilah yang mendorong pemuda berlaku revolusioner. Perilaku revolusioner inilah yang memunculkan anggapan bahwa

pemuda itu tidak berpikir panjang sehingga akan berpotensi untuk menimbulkan konflik baik itu dengan sesama pemuda maupun dengan orang tua. Selalu optimis, Sifat ini sangat menunjang sifat kerja keras dan pantang menyerah. Sifat optimis ini akan mendorong pemuda selalu bersemangat berusaha untuk mencapai cita-citanya.

Berdasarkan tinjauan tersebut, mendefinisikan pemuda itu tidaklah mudah. Hal ini disebabkan karena pemuda tidak hanya dilihat dari sisi usia, akan tetapi pemuda juga harus ditunjang oleh sifat/jiwa yang berbeda dengan golongan usia lainnya. Seseorang yang berusia muda belum tentu dapat dikatakan pemuda jika sifat/jiwanya tidak mencerminkan seorang pemuda. Demikian juga sebaliknya seseorang yang sudah tidak masuk kategori muda secara usia belum tentu tidak mempunyai sifat/jiwa seperti pemuda pada umumnya.

Pemuda adalah individu yang bila dilihat secara fisik sedang mengalami perkembangan dan secara psikis sedang mengalami perkembangan emosional, sehingga pemuda merupakan sumber daya manusia pembangunan baik saat ini maupun masa datang.

Secara internasional, WHO menyebut sebagai "young people" dengan batas usia 10 - 24 tahun, sedangkan usia 10 - 19 tahun disebut "adolesceneae" atau remaja. International Youth Year yang diselenggarakan tahun 1985, mendefinisikan penduduk berusia 15 - 24 tahun sebagai kelompok pemuda.

Definisi yang kedua, pemuda adalah individu dengan karakter yang dinamis, bahkan bergejolak dan optimis namun belum memiliki pengendalian emosi yang stabil. Pemuda menghadapi masa perubahan sosial maupun kultural.

Sedangkan menurut draft RUU Kepemudaan, Pemuda adalah mereka yang berusia antara 18 hingga 35 tahun. Menilik dari sisi usia maka pemuda merupakan masa perkembangan secara biologis dan psikologis. Oleh karenanya pemuda selalu memiliki aspirasi yang berbeda dengan aspirasi masyarakat secara umum, dalam makna yang positif aspirasi yang berbeda ini disebut dengan semangat pembaharu.

Dalam kosakata bahasa Indonesia, pemuda juga dikenal dengan sebutan generasi muda dan kaum muda. Seringkali terminologi pemuda, generasi muda, atau kaum muda memiliki definisi beragam. Definisi tentang pemuda di atas lebih pada definisi teknis berdasarkan kategori usia sedangkan definisi lainnya lebih fleksibel. Pemuda / generasi muda / kaum muda adalah mereka yang memiliki semangat pembaharu dan progresif.

2. Era Milenial

Milenial juga dikenal sebagai Generasi Y, Gen Y atau Generasi Langgas adalah kelompok demografi setelah Generasi X (Gen - X). Tidak ada batas waktu yang pasti untuk awal dan akhir dari kelompok ini. Para ahli dan peneliti biasanya menggunakan awal

1980-an sebagai awal kelahiran kelompok ini dan pertengahan tahun 1990-an hingga awal 2000-an sebagai akhir kelahiran.

Milenial pada umumnya adalah anak-anak dari generasi Baby Boomers dan Gen - X yang tua. Milenial kadang-kadang disebut sebagai Echo Boomers karena adanya booming (peningkatan besar), tingkat kelahiran pada tahun 1980-an dan 1990-an. Untungnya di abad ke 20 tren menuju keluarga yang lebih kecil di negara-negara maju terus berkembang, sehingga dampak relatif dari baby boom echo umumnya tidak sebesar dari masa ledakan populasi pasca Perang Dunia II.

Millennials atau kadang juga disebut dengan generasi Y adalah sekelompok orang yang lahir setelah Generasi X, yaitu orang yang lahir pada kisaran tahun 1980- 2000an. Maka ini berarti millenials adalah generasi muda yang berumur 17 - 37 pada tahun ini. Millennials sendiri dianggap spesial karena generasi ini sangat berbeda dengan generasi sebelumnya, apalagi dalam hal yang berkaitan dengan teknologi.

3. Pembangunan Desa

Menurut Fakih (2001:10) Umumnya orang beranggapan bahwa pembangunan adalah kata benda netral yang maksudnya adalah suatu kata yang digunakan untuk menjelaskan proses dan usaha yang meningkatkan kehidupan ekonomi, politik, budaya, infrastruktur masyarakat dan sebagainya.

Kemudian menurut Galtung (dalam Trijono, 2007:3) Pembangunan merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, baik secara individual maupun kelompok, dengan cara-cara yang tidak menimbulkan kerusakan, baik terhadap kehidupan sosial maupun lingkungan alam.

Sedangkan menurut Katz (dalam Yuwono, 2001:47) mengatakan pembangunan yang besar dari suatu keadaan tertentu ke keadaan yang dipandang lebih bernilai. Pada umumnya tujuan-tujuan pembangunan adalah pembinaan bangsa (national building) atau perkembangan sosial ekonomi. Maka untuk mencapai pembangunan yang telah dicanangkan selama ini bahwa dapat berjalan sesuai harapan bersama bahwa peningkatan kesejahteraan manusia menjadi fokus sentral dari pembangunan dimana pelaksanaan pembangunan masyarakatlah yang menentukan tujuan, sumber-sumber pengawasan dan pengarahannya proses-proses pelaksanaan pembangunan.

Menurut Effendi (2002:2) pembangunan adalah suatu upaya meningkatkan segenap sumber daya yang dilakukan secara berencana dan berkelanjutan dengan prinsip daya guna yang merata dan berkeadilan.

Kata "Desa" sendiri berasal dari bahasa India yakni "swadesi" yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu

kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas (Soetardjo, 1984:15, Yuliati, 2003:24).

Menurut defenisi umum, Desa adalah sebuah aglomerasi permukiman di wilayah perDesaan (Hardjatno, 2007). Di Indonesia, istilah Desa adalah pembagian wilayah administrative di bawah Kecamatan, yang dipimpin oleh kepala Desa. Menurut Poerwadarminta (1976) Desa adalah sekelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan, kampung (di luar kota) dusun atau udik (dalam arti daerah pedalaman sebagai lawan dari kota).

Berdasarkan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, di mana Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat yang bertempat tinggal sejumlah manusia yang berhak mengatur dirinya sendiri, merupakan organisasi masyarakat hukum paling tua, mendahului masyarakat hukum sebelum negara ini merdeka. Desa mengandung unsur asli sebagai warisan nenek moyang dengan beragam budaya yang menghiasinya.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

1. Kecamatan Bontocani

Kecamatan Bontocani Merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan. Luas wilayah Kecamatan Bontocani yaitu 463,35 M². Batas Batas Wilayah Kecamatan Bontocani Yaitu :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Kecamatan Kahu dan Kecamatan Libureng
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Kabupaten Sinjai
3. Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten Gowa dan Kabupaten Maros
4. Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Kecamatan Kahu

PETA WILAYAH KECAMATAN BONTOCANI



Ketinggian rata rata diatas permukaan laut diatas rata – rata 142,64 M² diatas permukaan laut. Semua wilayah Kecamatan Bontocani

merupakan wilayah pegunungan yang pada umumnya masyarakat di Kecamatan Bontocani merupakan petani dan pekebun. Jarak antara Kecamatan Bontocani Kekota Kabupaten adalah 125 Km, dan jarak ke kota Provinsi 180 Km. kondisi ketinggian laut di Kecamatan Bontocani dapat diperinci dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1: Data Luas Wilayah Berdasarkan Desa / Kelurahan Kecamatan Bontocani

Kode Wilayah	Desa / Kelurahan	Luas (KM ² Total Area	Presentase
1	2	3	4
001	Watang Cani	50,53	10,91
002	Pattuku	30,24	6,53
003	Bontojai	51,25	11,06
004	Bulusirua	42,19	9,11
005	Bana	69,16	14,93
006	Pammusureng	32,30	6,97
007	Kahu	34,26	7,39
008	Langi	59,20	12,78
009	Erecinnong	35,04	7,56
010	Lamoncong	29,42	6,35
011	Mattirowalie	29,76	6,42
	Jumlah / Rata-Rata	463,35	100,00

Sumber Data: Bontocani dalam angka/BPS 2018

Tabel 2; Data Tinggi Wilayah Diatas Permukaan Laut Berdasarkan Desa / Kelurahan Kecamatan

Bontocani

Desa / Kelurahan	Tinggi (Meter)
1	2
Watang Cani	110
Pattuku	120
Bontojai	132
Bulusirua	165
Bana	244
Pammusureng	115
Kahu	112
Langi	118
Erecinnong	134
Lamoncong	137
Mattirowalie	182
Jumlah / Rata-Rata	142,164

Sumber Data: Bontocani dalam angka/BPS 2018

Berdasarkan data terakhir pada pertengahan tahun 2018 (BPS Kabupaten Bone), jumlah penduduk di Kecamatan Bontocani berjumlah 15.769 jiwa dengan laki-laki dan 7.858 jiwa dan Perempuan

7911 dengan rasio Penduduk Laki Laki dan Perempuan 99,33 yang tersebar di 10 Desa dan 1 Kelurahan.

Tabel 3: Rincian Jumlah Penduduk di setiap Desa yaitu :

Desa /Kelurahan	Jenis Kelamin (sex)			Rasio Jenis Kelamin (sex ratio)
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1	2	3	4	5
Watang Cani	934	972	1.906	96,09
Pattuku	737	714	1.451	103,22
Bontojai	944	960	1.904	98,33
Bulusirua	739	680	1.419	108,68
Bana	1.184	1.207	2.397	98,09
Pammusureng	645	653	1.298	98,77
Kahu	692	692	1.384	100,00
Langi	963	1.017	1.980	94,96
Erecinnong	477	485	962	98,35
Lamoncong	1.68	175	343	96,00
Mattirowalie	375	356	731	105,34
Jumlah	7.858	7.911	15.769	99,33

Sumber Data: Bontocani dalam angka/BPS 2018

Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan Zaman Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone telah Melalui Regenerasi tempat dan Pemerintahan Kantor Camat dan Camat di setiap Tahunnya. Bontocani yang kita kenal saat ini dikenal dengan Nama “**Wawobulu**” Kemudian pada sekitar tahun 1962 Wawobulu menjadi dua Kecamatan yaitu Kecamatan kahu dan Kecamatan bontocani dengan nama “distrik” pada jaman tersebut. Pusat Pemerintahan pada saat itu bertempat di Kahu Desa Pammusureng.

Setelah pemecahan menjadi Dua Distrik Pusat pemerintahan Kecamatan Bontocani di pindah ke Desa watang cani. Tahun 1970 Pusat dikembalikan di kahu Desa pammusureng yang saat ini berubah nama menjadi kelurahan kahu. Pada tahun 1993 sebelumnya berjumlah enam Desa dimekarkan menjadi 10 Desa dan 1 Kelurahan Desa Pammusureng di Mekarkan Menjadi Dua yakni Kelurahan Kahu dan Desa Pammusureng, Desa Bontojai Dimekarkan Menjadi 2 Yaitu Desa Bontojai dan Desa Bulusirua, Desa Langi dimekarkan Menjadi 2 Desa yaitu Desa Langi dan Desa Lamoncong, Desa Pattuku Dimekarkan Menjadi 2 Desa yaitu Desa Pattuku dan Desa Erecinnong dan yang terakhir adalah Desa Watang cani di Mekarkan Menjadi dua Desa yaitu Desa Watang cani dan Desa Mattirowalie.

Tabel 4: Secara administratif Kecamatan Bontocani terdiri dari Sepuluh Desa dan Satu Kelurahan

No	Nama Desa	Luas Wilayah (km ²)
----	-----------	---------------------------------

1	Desa Watang Cani	50,53
2	Desa Pattiku	30,24
3	Desa Bontojai	51,25
4	Desa Bana	69,61
5	Desa Bulu Sirua	42,19
6	Desa Erecinnong	35,04
7	Kelurahan Kahu	34,26
8	Desa Langi	59,20
9	Desa Pammusureng	32,30
10	Desa Mattirowalie	29,76
11	Desa Lamoncong	29,42

Sumber Data: Bontocani dalam angka/BPS 2018

2. Desa Bana

Yang menjadi pusat penelitian dalam tesis ini adalah Desa Bana. Menurut cerita yang dihimpun dari Kepala Desa Bana, Ishak S.PdI, dan beberapa sumber dari website, daerah Desa Bana memiliki luas 69,16 km² dengan jumlah penduduk 2.267 jiwa ini pada awalnya dihuni oleh satu keluarga yang mempunyai 12 orang anak. Kemudian ke 12 anak itu mempunyai keluarga dan dibagi menjadi 12 bagian wilayah yang disebut "Lari Tanah" sesuai dengan wilayah yang diberikan kedua belas anak itu untuk menjadi hak masing-masing untuk menguasai hal-hal didalamnya.

Adapun nama - nama Lari Tanah "ADE" sesuai julukan ke 12 bersaudara itu adalah Fuatta, Tengnga, Genre, Saharu, Anakarungge,

Kajuara, Segeri, Safosuji, Sullehatangnge, Kapala, Guru Kampong dan Sanro Hanua.

Kemudian pada waktu karena keadaan masyarakat untuk mempertahankan hidup mereka mencari makanan di hutan di luar tempat Lari Tananya. Tak terduga salah seorang penduduk melihat seorang laki-laki di hutan kemudian melapor kepada ketua Adat.

Setelah itu ketua adat menemui orang tersebut dan ditanyakan asal-usulnya. Dari hasil pembicaraan terungkap bahwa laki-laki tersebut adalah keturunan Raja Bone (Wijanna Mangkau'E di Bone/Salassae). Kemudian ketua adat pergi ke kerajaan Bone untuk menghadap tentang kebenaran pernyataan dan stambuk yang dibawa laki-laki tersebut.

Ternyata keterangan yang disampaikan Ketua Adat kepada Raja Bone diiyakan dengan berkata "BA NA" artinya betul anak bahwa laki-laki tersebut adalah keturunan Raja Bone tapi, karena pernah membuat pelanggaran sehingga dihukum dengan diasingkan dan ternyata sampai ke daerah ketua adat tersebut. Selanjutnya ketua adat meminta kepada agar laki-laki itu diangkat menjadi Raja/Arung kemudian diiyakan oleh raja Bone dengan kata Ba Na yang artinya ia betul. Sekembalinya dari menghadap Raja Bone, ketua adat tersebut menikahkan anaknya dengan laki-laki tersebut dan kemudian diangkat menjadi Raja Bana.

Dari cerita diata dari jawaban Raja Bone "BA NA" digabungkan menjadi BANA dan sampai sekarang menjadi nama sebuah dusun dan nama Desa.

Desa Bana pada awal terbentuknya menjadi Desa hanya menjadi 3 dusun yaitu Bana, Oro dan Cippaga. Tapi karena begitu luasnya daerah Bana sehingga dusun Cippaga dimekarkan menjadi 3 Dusun yaitu Dusun Paku, Cippaga dan Pao serta dusun bana dimekarkan juga menjadi 2 dusun yaitu dusun bana dan dusun bana Tengah. Sehingga sampai Desa Bana menjadi 6 dusun. , sedangkan Pemerintahan Desa Bana telah mengalami sekurangnya 7 (Tujuh) kali pemerintahan ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4: Nama-nama kepala Desa Sebelum dan sesudah berdirinya Desa Bana

No	Periode	Kepala Desa	Keterangan
1.	1962-1963	A.Lanti Nyonri	Penunjukan
2.	1963-1964	A.Guntur	Penunjukan
3.	1964-2003	A.Muin Baso	Penunjukan/Pemilihan
4.	2003-2009	M.Amir.P	Pemilihan
5.	2009-Okt 2014	M.Amir.P	Pemilihan
6.	Okt 2014- Des 2015	Abdul Kahar, S.Pd.,M.Si	Penjabat Sementara
7.	Des 2015 – sekarang	Ishak, S.PdI	Pemilihan

Sumber data: Webside Desa Bana

Untuk mengetahui gambaran kondisi sosial masyarakat Desa Bana, dapat dilihat melalui aspek pendidikan, aspek kesehatan, aspek keamanan dan ketertiban, aspek keagamaan, aspek kesenian dan olah

raga serta kehidupan gotong royong masyarakat yang merupakan ciri khas masyarakat Desa yang tetap tumbuh dan berkembang.

Kondisi Desa Bana dari aspek pendidikan dapat digambarkan berdasarkan sarana dan prasarana pendidikan yang ada. Untuk menggambarkan kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5: kondisi aspek pendidikan di Desa Bana Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone

No	Nama Sekolah	Jenjang	Status	Lokasi
1.	TK Panre Tanrae	TK	Swasta	Dusun Oro
2.	TK Al-Ikram	TK	Swasta	Dusun Paku
3.	TK Al Islam babul Jannah	TK	Swasta	Dusun Bana
4.	SDN 296 Bana	SD	Negeri	Dusun Oro
5.	SDN Inp. 12/79 Bana	SD	Negeri	Dusun Paku
6.	SDN Inp. 5/81 Bana	SD	Negeri	Dusun Bana
7.	SMP 5 Bontocani	SMP	Negeri	Dusun Paku

Sumber data: Webside Desa Bana

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa sarana pendidikan yang ada di Desa Bana berjumlah 7 buah. Hal ini menunjukkan bahwa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA dan seterusnya penduduk Desa Bana harus mencari sekolah di luar Desa yaitu di Kelurahan Kahu yang berjarak 12 KM dari Desa Bana.

Dari aspek kesehatan, kondisi Desa Bana dapat digambarkan berdasarkan sarana kesehatan, tenaga kesehatan dan hal lainnya yang menggambarkan pelayanan kesehatan masyarakat di Desa Bana

Tabel 6: Sarana Kesehatan Desa Bana

No	Dusun	Puskesmas	Pustu	Polindes	Posyandu
1.	Oro	–	–	–	1
2.	Bana	–	–	–	1
3.	Cippaga	–	–	–	–
4.	Paku	–	–	–	–
5.	Pao	–	–	1	1
6.	Bana Tengah	–	–	–	–
Jumlah		–	–	1	3

Sumber data: Webside Desa Bana

Gambar 7: Jumlah Pemuda Desa Bana

No	Umur	Jumlah
1	18	54 Orang
2	19	86 Orang

3	20	64 Orang
4	21	69 Orang
5	22	50 Orang
6	23	50 Orang
7	24	33 Orang
9	25	42 Orang
10	26	51 Orang
11	27	32 Orang
12	28	32 Orang
13	29	37 Orang
14	30	37 Orang
15	31	33 Orang
16	32	41 Orang
17	33	57 Orang
18	34	46 Orang
Total		814 Orang

Tabel 8: Pengelola Sarana dan Prasarana di Desa Bana

No	Dusun	Kader Posyandu	Kader Taman Paditungka	Bindan Desa/Perawat	Dukun Beranak
1.	Oro	5	–	1	1
2.	Bana	5	–	1	1
3.	Cippaga	5	–	–	1
4.	Paku	5	–	1	1
5.	Pao	5	–	–	1
6.	Bana Tengah	5	–	–	1
	Jumlah	30	–	3	6

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui kondisi sarana kesehatan seperti Poskesdes tidak efektif karena terletak diujung Desa, sedangkan tenaga kesehatan masih kurang karena belum ada Dokter atau perawat yang ada hanya bidan Desa.

Kondisi aspek keamanan dan ketertiban Desa Bana dapat digambarkan berdasarkan ketersediaan sarana dan prasarana

poskamling, partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan serta situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat. Desa Bana memiliki poskamling sebanyak 4 Buah dan petugas keamanan Desa (Linmas) sebanyak 12 orang.

Kondisi keagamaan di Desa Bana dapat digambarkan berdasarkan sarana peribadatan yang ada, pelaksanaan aktivitas keagamaan dan toleransi kehidupan beragama. Sarana peribadatan yang ada di Desa Bana yaitu masjid/mushollah sebanyak 7 buah. Penduduk Desa Bana seluruhnya beragama Islam, pelaksanaan kegiatan perayaan keagamaan seperti Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha dan peringatan hari-hari besar agama Islam seperti Maulid Nabi Muhammad SAW, Isra' Mi'raj serta ibadah bulan Ramadhan seluruhnya.

Hal ini adalah sebagai bentuk kerjasama yang baik antara masyarakat dengan lembaga-lembaga keagamaan yang ada di Desa Bana, seperti Remaja Masjid, BKMT dan pantia hari-hari besar Islam.

Adapun Visi Desa Bana untuk periode 2016-2021 adalah "Terwujudnya Desa Bana Yang Mandiri Sejahteradan Religius ". Untuk dapat merealisasikan Visi Bana dirumuskan 4 Misi sebagai berikut ;

1. Penataan kelembagaan, organisasi dan administrasi Desa secara profesional.
2. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang bersih, transparan dan akuntabel.
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas.

4. Peningkatan ketersediaan kualitas infrastruktur secara adil dan merata.
5. Pengembangan sektor pertanian dan perekonomian

B. Deskripsi Informasi Peneliti

Kriteria penentuan Informan tidak ada penentuan baku yang dibuat oleh peneliti, yang jelas adalah Pemuda dan tokoh masyarakat Desa di Desa Bana, Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone, namun dalam proses wawancara dengan informan ada beberapa orang Pemerintah Desa (Kepala Desa Bana yang peneliti ambil sebagai sumber informasi).

C. Pembahasan

Peran pemuda dalam pembangunan sangat penting. Pemuda secara historis, memberikan kontribusi yang cukup besar bagi bangsa kita, dengan begitu tidak ada alasan dalam program pembangunan Desa, peran dan kiprah pemuda untuk tidak diikutsertakan. Pemuda menjadi lokomotif perubahan, berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan Desa.

Keberadaan Desa di Indonesia dengan segala permasalahan yang dimilikinya saat ini sangat membutuhkan peranan nyata dari banyak pihak. Pembangunan Desa menjadi tanggung jawab semua komponen, tak terkecuali pemuda. Desa membutuhkan peranan pemuda yang mau berkontribusi diri untuk pembangunan terutama di Desa. Kualitas

pemuda sangat menentukan, maju-mundur, sejahtera atau sengsaranya suatu peDesaan.

Pembangunan pada prinsipnya sebuah proses sistematis dan bertahap yang dilakukan oleh masyarakat atau warga setempat untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dari apa yang dirasakan sebelumnya. Karena itu, pemuda melakukan pembangunan perlu melakukan tahapan yang sesuai dengan sumber daya yang dimilikinya dengan mempertimbangkan segala bentuk tantangan yang tengah dihadapinya.

Keberadaan pemuda sebagai penggerak dan perubah keadaan sangat memainkan posisi yang strategis dan teramat penting. Strategis mengandung arti bahwa pemuda adalah kader penerus kepemimpinan, pembaharu keadaan, pelopor pembangunan, penyemangat bagi kaum remaja dan anak-anak. Oleh karena itu, paling tidak ada sejumlah peran utama yang telah dilakukan pemuda di Desa Mallari sebagai *organizer* atau penggerak yang menata dan membantu sebagai *mediamaker* atau fasilitator yang berfungsi menyampaikan aspirasi, keluhan dan keinginan warga; dan sebagai leader, pemimpin di masyarakat, menjadi pengurus publik/ warga utama kaitannya dengan pembangunan Desa.

Dalam penelitian ini menunjukkan, pemuda Desa Bana sangat berkontribusi dalam pembangunan, berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintahan Desa

membangun solidaritas sosial antar warga, aktif dalam membangun dan mengembangkan wadah atau organisasi yang memberikan manfaat bagi warga, tak ketinggalan, berpartisipasi dalam mempraktikkan nilai-nilai luhur budaya lokal dan agama.

Dalam membangun sebuah Desa, peran pemuda tidaklah gampang. Karena permasalahan Desa yang begitu kompleks. Di Desa Bana, mereka mampu menjadi perangsang bagi program kerja yang telah dirumuskan oleh perangkat Desa.

Dari hasil penelitian, pengolahan dan analisis data dapat dilihat posisi pemuda dalam proses pembangunan di Desa Bana, partisipasi pemuda dalam proses pembangunan yang mempengaruhi keterlibatan pemuda dalam pembangunan di Desa Bana.

Rilnya adalah seperti ini, jika seorang bersekolah maka hendaklah bersungguh-sungguh dan mengerti apa tujuan utama ia bersekolah. Yaitu melakukan perbaikan diri. Hasil yang ia capai hendaknya tidak hanya semata-mata digunakan untuk mencari harta, tapi juga untuk pengabdian. Ia tularkan ilmu yang telah didapatkannya kepada masyarakat, baik anak-anak maupun dewasa sesuai dengan kapasitas dan daya tangkap masyarakatnya.

Peran kedua adalah menjadi wakil terdepan dalam berbagai ajang kompetisi masyarakat. Kompetisi di sini tidak boleh dipahami secara sempit hanya sebatas perlombaan. Tetapi bagaimana, pemuda memiliki daya saing yang handal dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Sehingga

Desa ini diperhitungkan oleh masyarakat lain maupun pemerintah, karena kualitas dan kuantitas pemuda yang ada. Peran Ketiga, Ikut aktif dalam berorganisasi dan mengorganisir diri dalam lembaga kemasyarakatan Desa yang bisa menjadi wadah bagi teman-teman pemuda untuk berdinamika, menyalurkan ide, berkreasi dalam bidang Olah Raga, Seni Budaya, Wirausaha dan mengabdikan dirinya pada bidang lainnya.

Peran Keempat, Membangun sinergi dengan para sesepuh Desa dan perangkat Desa. Hal ini sangatlah perlu karena dalam sebuah Desa sudah ada tatanan dan perundang – undangan yang mengikat baik tertulis maupun tidak tertulis, keberadaan kaum sesepuh kadangkala akan menjadi penghambat gerakan pemuda jika tidak ada pendekatan yang mengedepankan rasa sehingga para tokoh memahami akan tujuan gerakan kaum muda itu. Keterlibatan perangkat Desa sangat membantu jalannya organisasi pemuda sehingga permasalahan yang timbul bisa diselesaikan bersama.

Peran Kelima, Memperkuat unsur keuangan organisasi. Pendanaan organisasi adalah ruh yang menggerakkan organisasi disamping anggota dan semangat bersatu dan membangun Desa, “kalau tidak ada duit ya susah brow” keuangan organisasi bisa diperoleh dari iuran anggota atau sumbangan, sumbangan bisa dari perseorangan maupun institusi misalnya dari Pemerintah Desa melalui kegiatan yang dibiayai dari APBDesa.

Peran Keenam, Mengingat pemuda sebagai Agent Of Change dan Agen Controlling, tantangan dalam proses pembangunan Desa kedepannya sangat di perlukan pemuda dalam mengawasi serta mengontrol kebijakan maupun pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa. Karena selain pemuda memiliki idealisme tinggi, juga tidak banyak memiliki kepentingan terselubung dalam melakukan aktivitasnya. Maka dari itu penulis berharap dengan adanya tulisan ini pemuda dapat ikut sadar dan berperan dalam suatu pembangunan Desa kedepannya. Mulai dari proses Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Pelaporan dan pertanggungjawaban.

1. Peran Pemuda Desa Bana Dalam Pembangunan Desa

Pemuda tidak terlepas dari perannya sebagai wahana pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang bermutu dan terarah. Pemerintah di Desa Bana bersinergi dengan pemuda dalam melakukan terobosan-terobosan baru, dalam prmbangunan Desa. Oleh karena itu, keterlibatan pemuda Desa yang tergerakkan dalam sejumlah agenda Desa.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan keikutsertaan pemuda dalam proses pembangunan di Desa Bana melalui tahap dengan menggunakan proses pencerahan, proses pengayaan dan proses partisipasi.

Peran pemuda dalam pembangunan masyarakat peDesaan memperlihatkan fungsi sosial. Sebelum diadakan Program pembangunan dan pemberdayaan yang dilaksanakan di Desa Bana, Pemerintah mengadakan dulu proses pencerahan (enlightment) yaitu sosialisasi yang dilaksanakan di Desa itu sendiri, lahak S.Pdl selaku Kepala Desa mengungkapkan bahwa :

“Kami mengadakan Sosialisasi di Mesjid tentang, bukan hanya itu kami juga selalu mengadakan musyawarah terkait program-program yang akan dijalankan. Dan juga adanya transparansi anggaran terkait program-program yang akan dijalankan”. (Wawancara pada tanggal 22 Juli 2019).

Pernyataan senada ditempat yang sama juga diungkapkan oleh salah seorang tokoh pemuda Desa Bana, Andi Ridwan:

“Pemerintah Desa memberikan pemahaman kepada masyarakat maupun pemuda tentang program-program yang akan dilaksanakan ini melalui musyawarah-musyawah Desa yang dilaksanakan”. (Wawancara pada tanggal 22 Juli 2019).

Pernyataan diatas mengungkapkan bahwa pemahaman tentang proses pembangunan yang dilakukan agar masyarakat atau pemuda mengerti tentang pembangunan yang akan dilaksanakan di Desa Bana. Para pemuda mengungkapkan bahwa dalam proses pembangunan yang dilakukan di Desa Bana, masyarakat Desa terutama pemudanya diberikan dulu semacam pemahaman tentang program yang akan dilaksanakan seperti diadakan sosialisasi, musyawarah dusun dan bahkan musyawarah Desa.

Dengan peningkatan Kompetensi Pemuda di Desa Bana, diharapkan mampu mengelola potensi Desa secara optimal, memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunan Desa, serta mampu menempatkan masyarakat sebagai titik sentral, sehingga masyarakat bukan hanya sebagai objek pembangunan tapi juga sebagai subjek yang mampu berperan aktif dalam semua proses kegiatan pembangunan.

Sebagai akselerasi untuk mewujudkan perekonomian yang stabil melalui program pelatihan, peningkatan nilai tambah produk dan pengembangan produk unggulan. Pengayaan bagi pemuda Desa Bana sifatnya prioritas, salah satunya lewat peningkatan kapasitas, hal inilah yang akan menjadikan pemuda lebih berdaya, memiliki pengetahuan, wawasan dan keterampilan atau *skill* yang lebih baik dalam pelaksanaan pembangunan Desa.

Pemuda mengetahui kira kira peluang usaha apa tepat yang menjadi unggulan dari Desa, atau juga bisa misalkan potensi masyarakat Desa yang mendominasi dalam artian disebuah Desa mayoritas penduduknya sebagai pengrajin *songkok to bone*.

Hal tersebut bisa ditangkap menjadi sebuah peluang untuk dikembangkan, dan menjadi tugas BUMDes untuk mewadahi dan memfasilitasi potensi tersebut. Pengembangan juga dilakukan untuk membentuk dan mengembangkan jaringan antar BUMDes, sehingga Badan usaha Milik Desa yang sudah terbentuk di satu

Desa bisa menjalin mitra dengan Badan usaha Milik Desa Lainnya, membuat sebuah asosiasi BUMDes misalnya, yang dalam hal ini dapat meningkatkan hubungan BUMDes satu dengan BUMDes Lainnya,

Pemuda memberikan manfaat seperti ikut memperluas pemasaran produk bagi BUMDes BUMdes tersebut, selain memperluas pasar adanya jalinan antar BUMdes juga bisa memberikan wadah untuk komunikasi, saling bertukar pengalaman dan Informasi bagi pengurus pengurus BUMDes dan lebih konsisten.

Program pembangunan dan pemberdayaan telah mempertimbangkan aspek pemanfaatan SDM di Desa Bana. Masyarakat dan Pemuda berkumpul dan mengeluarkan pendapat, untuk suatu kepentingan kolektif yang sebenarnya memiliki basis pijakan kepentingan bersama. Partisipasi (dalam kondisi ini) di Desa Bana berhasil mendialogkan kepentingan masyarakat sepenuhnya.

Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh pemuda yaitu pertama, berpartisipasi dalam mempraktikkan nilai-nilai luhur budaya lokal dan agama, dan membangun solidaritas sosial antar warga. Kedua, aktif dalam membangun dan mengembangkan wadah atau organisasi yang memberikan manfaat bagi warga. Ketiga, memajukan Desa dengan memperbanyak belajar, karya

dan cipta yang bermanfaat bagi warga. Keempat, berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintahan Desa. Dan kelima, melakukan upaya-upaya untuk mendorong pemerintahan dalam setiap tingkatan (pusat, daerah dan Desa) untuk menjalankan fungsinya sebagai pengurus warga yang benar-benar berpihak pada warga.

Strategi dan perencanaan pembangunan Desa akan tepat mengenai sasaran, terlaksana dengan baik dan dimanfaatkan hasilnya, apabila perencanaan tersebut benar-benar memenuhi kebutuhan warga setempat atau menekankan prinsip pro poor, pro jobdan pro growth. Untuk memungkinkan hal itu terjadi, khususnya pembangunan perDesaan, mutlak diperlukan keikutsertaan warga Desa secara langsung dalam penyusunan rencana dan terlibat dalam setiap agenda. Sikap gotong royong, bahu-membahu, dan saling menjaga hendaknya dilakukan warga Desa demi terciptanya pembangunan Desa yang lebih baik.

Keberhasilan pembangunan Desa pada akhirnya berarti juga keberhasilan pembangunan nasional. Karena Desa tidak dipungkiri sebagai sumber kebutuhan warga perkotaan. Dan sebaliknya ketidakberhasilan pembangunan peDesaan berarti pula ketidakberhasilan pembangunan nasional. Apabila pembangunan nasional digambarkan sebagai suatu titik, maka titik pusat dari lingkaran tersebut adalah pembangunan peDesaan. Karena itu,

pemerintah dalam hal ini jangan mengabaikan Desa dan mengenyampingkan kebutuhan warga Desa. Ciri sebuah negara yang maju bukan bertolak pada pembangunan yang bersifat sentralistik, dalam hal ini berpusat di perkotaan. Tapi antara Desa dan kota memerlukan pembangunan yang seimbang dan merata.

Untuk saat ini, Andi Ridwan, SH (Tokoh pemuda Desa Bana) yang penulis temui dan melakukan wawancara menuturkan:

“Keterlibatan pemuda dalam pembangunan Desa maupun pengembangan karakter masyarakat di Desa Bana sudah diangka 40 persen daji jumlah pemuda yang ada” (Wawancara pada tanggal 22 Juli 2019).

Hal tersebut terlihat pada beberapa organisasi pemuda seperti remaja masjid dan Ikatan Pelajar Mahasiswa Bana (IPMB) yang senangtiasa dilibatkan oleh pemerintah Desa, dalam hal ini Kepala Desa Bana, Ishak S.Pdl disetiap kegiatan pembangunan maupun pembahasan rancangan anggaran untuk pembangunan infrastruktur Desa ataupun kegiatan social lainnya.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Andi Imran, S.Sos (Tokoh Pemuda Desa Bana):

“Dari masa kemasa pembangunan di Desa Bana cukup mengalami kemajuan. Kemajuan itu sangat nampak terlihat mulai pada tahun 2009 hingga saat ini. Ditahun itu, pembangunan infrastruktur, perekonomian, sumberdaya sudah mulai terlihat perkembangannya, bahkan orang rua akan yang awalnya buta akan Pendidikan mulai berpikiran untuk menyekolahkan anaknya hingga kejenjang yang lebih tinggi” (Wawancara pada tanggal 22 Juli 2019).

Proses Pengayaan ini memang sangat diperlukan untuk memperkuat pengetahuan dan kemampuan serta menumbuhkan

kepercayaan diri masyarakat agar bisa menunjang kemandirian. Upaya yang dapat dilakukan dalam langkah pengayaan melalui aksi-aksi nyata seperti sosialisasi, pelatihan tenaga kerja, lapangan kerja unit BUMDes.

2. Sinergitas Pemerintah Desa Bana Dengan Pemuda Desa

Dalam Pembangunan Diera Milenial

Menurut Katz (dalam Yuwono 2001:47) mengatakan bahwa pembangunan adalah Sebagai perubahan sosial yang besar dari suatu keadaan tertentu ke keadaan yang dipandang lebih bernilai. Maka untuk mencapai pembangunan nasional yang berkeadilan itu, sebagai usaha yang telah dilakukan pemerintah dengan mengadakan Program Pembangunan.

Dalam teori pembangunan, pendekatan terhadap partisipasi dimaknai sebagai kontribusi masyarakat untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pembangunan dalam mempromosikan proses demokratisasi dan pemberdayaan. Pembangunan dengan cara mengikutsertakan masyarakat merupakan salah satu upaya untuk memanfaatkan potensi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi agar pembangunan yang dihasilkan nantinya akan sesuai dengan kebutuhan mereka.

Hal itu dilakukan dengan cara mengikutsertakan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi

untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Jadi, pada akhirnya masyarakat bukanlah objek yang hanya sebagai penerima program pembangunan itu sendiri.

Keberhasilan suatu pembangunan sangat dipengaruhi oleh proses perencanaan karena perencanaan merupakan tahap awal dan dasar dari proses pembangunan. Pemerintah Desa merupakan ujung tombak dalam pembangunan bangsa. Desa juga mempunyai otonomi untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, hal tersebut menandakan bahwa Desa diberikan wewenang untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan inisiatif, aspirasi, dan kebutuhan masyarakat setempat. Setiap pembangunan dimulai dari tahap perencanaan, begitu juga dengan Desa. Dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 79 disebutkan bahwa perencanaan pembangunan Desa harus mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/ kota.

Dengan kata lain, perencanaan pembangunan Desa harus berpedoman kepada perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan pembangunan daerah harus berpedoman kepada perencanaan pembangunan pusat sedangkan perencanaan pembangunan dari tingkat bawah berguna sebagai masukan kepada pemerintah di atasnya. Hal ini dimaksudkan agar terjadi

keselarasan antara perencanaan pembangunan di tingkat pusat, daerah, dan Desa dengan menggunakan sistem perencanaan *Top Down* dan *Bottom Up* seperti ini diharapkan pembangunan akan lebih efektif.

Sekaitan dengan bagaimana sinergitas pemuda dan pemerintah Desa soal pembangunan Desa di era milenial, Ishak S.Pdl, Kepala Desa Bama menuturkan:

“Pembangunan dalam satu Desa merupakan salahsatu tujuan kita (pemerintah Desa). Keterlibatan masyarakat utamanya pemuda tentunya sangat kita butuhkan apalagi saat ini era milenial. Yang pasti, berbicara soal sinergitas tentu kita berdinergi dengan pemuda, karena kita sangat membutuhkan ide-ide dan motifasi pemuda yang saat ini masuk dalam kategori milenial. Bagaimanapun juga ide dan gagasan pemuda sangat kita butuhkan untuk membangun Desa di era milenial ini” (Wawancara pada tanggal 24 Juli 2019).

Dikutip dari kompasiana.com, pada era globalisasi saat ini generasi muda banyak sekali mendapatkan pengetahuan teknologi, budaya, pendidikan, moral dan etika. Karena pada saat ini generasi muda ialah generasi millenials yaitu dimana generasi ini adalah generasi Y yang terbentuk bagi mereka-mereka yang lahir pada tahun 1980 hingga 2000 dan seterusnya. Dengan adanya kemajuan dalam teknologi dan Informasi pada era ini menjadi sebuah tantangan bagi bangsa Indonesia, yang dimana perilaku generasi millenials sering tidak stabil karena seiring dengan perubahan teknologi yang ada.

Dengan adanya perubahan gaya hidup, maka akan berdampak pada kehidupan selanjutnya. Dimana pada era millenials generasi muda banyak menghabiskan waktunya di dalam media sosial sebagai media pencari informasi. Akibat lekatnya dengan dunia maya, dengan memiliki pengetahuan tinggi dalam menggunakan platform dan perangkat mobile, ternyata hal tersebut melahirkan titik lemah bagi para generasi internet. Titik lemah tersebut berdampak buruk terhadap keamanan generasi millennial di dunia maya.

Seperti halnya inovasi yang dibuat oleh Pemerintah Kota Batu yaitu dengan dibuatnya program batu among tani teknologi. Di dalam program tersebut ada tiga program turunan di dalamnya yaitu ada, among Kota, among warga, dan among Tani. Aplikasi ini ditujukan kepada petani, dengan tujuan dapat memudahkan para petani dalam menjual produk hasil pertaniannya, kemudian petani dapat memangkas biaya yang sebelumnya mahal karena campur tangan tengkulak.

Pada aplikasi tersebut yaitu among tani ini dikemas dengan berbagai macam pilihan spesifikasi kualitas, harga sayuran. Pada aplikasi ini konsumen hanya mengklik nomor telepon produsen sayuran yang tertera pada daftar di aplikasi among tani tersebut. Produsen memberi keluasaan harga yang akan mereka berikan, harga yang dipatok yaitu sesuai kualitas.

Selain itu juga aplikasi ini petani juga dapat mengetahui tanaman apa saja yang dapat ditanam dan sedang menjadi komoditas besar pada saat itu, dan juga dilengkapi dengan Quest and answer untuk masalah tentang pertanian seperti permasalahan hama.

Hal tersebut sangatlah membantu bagi Desa-Desa yang ada disekitar batu, dan juga dapat membangun perekonomian di Desa. Dimana yang dulu hasil pertanian di kumpulkan pada tangan tengkulak, dengan adanya aplikasi Among tani dapat memangkas campur tanga tengkulak.

Namun dibalik suksesnya program tersebut juga terdapat kendala. Seperti halnya keterbatasan petani yang memiliki Handphone, dan juga akses internet.

Dengan Demikian seiring dengan perkembangan zaman pada era millineal ini kita harus memanfaatkan teknologi yang canggih ini untuk mempermudah masyarakat, dan juga harus digunakan untuk pembangunan perekonomian. Diharapkan dengan masuknya Internet dan teknologi ke Desa dapat meningkatkan perekonomian di Desa tersebut, sehingga berdampak pula pada penurunan angka kemiskinan di Indonesia.

Diera milenial ini, Ahmad Muntazar yang merupakan salahsatu tokoh pemuda menuturkan jika pembangunan Desa di

era milenial ini memang dibutuhkan sinergitas antar pemuda dan pemerintah Desa.

“Diera milenial ini pemuda adalah salahsatu penerus bangsa, oleh sebab itu, keterlibatannya (pemuda) dalam percepatan pembangunan Desa sangat dibutuhkan. Apalagi saat ini sebagaimana kita ketahui, perkembangan teghnolosi sangat berkembang pesat, dalam perkembangan ini ide dan gagasan pemuda memang sangat dibutuhkan. Namun jika berbicara sinergitas, saya melihat komunikasi pemerintah Desa dalam hal ini kepala Desa terjalin dengan baik, meskipun dalam perjalanan pembangunan ini ada banyak kritikan yang dilontarkan pemuda, namun saya melihat hal itu tidak menjadi sekat hubungan antar pemerintah Desa dengan pemuda” (wawancara pada tanggal 25 Juli 2019).

Hal senada juga diungkapkan salah seorang tokoh masyarakat Desa Bana yang juga merupakan mantan kepala dusun ceppaga:

“Dulu (tahun 2000an) memang sinergitas pemuda dan pemerinah Desa dengan pumuda tidak seperti sekarang ini. Dulu, pemuda Desa sedikit segan dengan kepala Desa, untuk melihat wajah kepala Desa saja takut apalagi jika ingun berinteraksi. Beda dengan sekarang ini komunikasi (sinergitas) pemuda dengan kepala Desa sudah mulai terbangun. Ini terlihat dengan pelibatan pemuda dalam beberapa program pemerintah Desa” (Wawancara pada tanggal 25 Juli 2019).

Program Pembangunan akan mencapai tujuan secara maksimal jika didukung oleh antusias pemuda selaku bagian dari sasaran dari program, kerjasama antara pemerintah dengan pemuda tentu akan menghasilkan output yang berbeda dengan program yang didalamnya terdapat kerjasama antara pemerintah dengan pemuda. Kepala Desa Bana, Ishak, S.PdI mengatakan:

“Tidak dapat kita pungkiri, sinergitas pemuda dengan pemerintah Desa sangat kita butuhkan, meskipun itu dalam perjalanannya terdapat berbagaimacam likaliku seperti keritikan maupun masukan dalam pengambilan kebijakan, namun itu merupakan sebuah proses untuk mencapai sebuah tujuan yang dimana masyarakat, kami dari pemerintah Desa dan pemuda sama-sama menginginkan yang Namanya sebuah kesejah teraan dan pembangunan yang layak di era milenial ini” (Wawancara pada tanggal 25 Juli 2019).

Dilihat dari hasil penelitian diatas, sinergitas pemerintah Desa Bana Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone dalam pembangunan Desa di era milenial berjalan dengan baik, meskipun didalam pengambilan keputusan pemerintah Desa terdapat dinamika-dinamika yang dimana beberapa keritikan dan masukan pemuda, namun Kepala Desa menganggap hal tersebut sifatnya membangun.

Faktor tersebut dipengaruhi karena pemikiran orang tua dari pemuda Desa bana yang awalnya tidak ingin menyekolahkan anaknya sudah berubah menjadi memberikan kebebasan atau kesempatan pada anaknya untuk keluar mengenyam Pendidikan agar kedepannya bisa memperbaiki perekonomian keluarga dan kembali ikut serta dalam pembangunan Desanya.

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan dari hasil penelitian berdasarkan data dan informasi yang telah di peroleh dari informan di lokasi penelitian, maka penelitian ini dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Peran pemuda dalam pembangunan Desa Bana Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone. Pada prinsipnya pemuda mempunyai peran dalam pembangunan Desa, seperti halnya yang terjadi di Desa Bana Kecamatan Bontocani. Disana, peran pemuda dalam pembangunan masyarakat pedesaan memperlihatkan fungsi sosial. Sebelum diadakan Program pembangunan dan pemberdayaan yang dilaksanakan di Desa Bana, Pemerintah mengadakan dulu proses pencerahan (enlightment) yaitu sosialisasi yang dilaksanakan di Desa itu sendiri. Program pembangunan dan pemberdayaan telah mempertimbangkan aspek pemanfaatan SDM di Desa Bana. Masyarakat dan Pemuda berkumpul dan mengeluarkan pendapat, untuk suatu kepentingan kolektif yang sebenarnya memiliki basis pijakan kepentingan bersama. Partisipasi (dalam kondisi ini) di Desa Bana berhasil mendialogkan kepentingan masyarakat sepenuhnya.
2. Dari hasil penelitian, sinergitas pemerintah Desa Bana Kecamatan Bontocani dengan pemuda Desa berjalan dengan

baik, pemerintah Desa dan pemuda menjalin komunikasi dengan baik untuk memajukan beberapa aspek di Desa Bana seperti perekonomian, pembangunan dan sumberdaya. Meskipun dalam prosesnya terdapat dinamika-dinamika yang timbul seperti keritikan dari pemuda, saran atau masukan dan lain sebagainya. Namun hal itu dianggap biasa oleh pemerintah Desa, karena Kepala Desa berpikiran untuk memajukan Desanya memang dibutuhkan keritikan dan masukan atau saran, apalagi dalam perkembangan kemajuan teknologi di era milenial ini dibutuhkan hal seperti itu untuk memajukan Desa agar tercipta yang namanya kesejahteraan.

B. Saran

1. Hendaknya Pemerintah Desa lebih melibatkan pemuda atau memberdayakan dan lebih mengutamakan kepentingan masyarakat terkhususnya pemuda Desa sebagai generasi penerus.
2. Hendaknya pihak terkait (pemuda) harus memiliki kesadaran terhadap pentingnya keterlibatan mereka dalam proses pembangunan yang dilaksanakan di Desa disertai dengan dorongan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Raharjo. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, Suharsimi. 2009. *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Bogdan & Taylor. (1989). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remadja Karya.
- Bungin, B.H.M. (2007). *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu social*. Jakarta : Kencana Prenama Media Group
- Daryanto. 2007. *Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hendryantoro, Anggun, 2014, *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata dan Implikasinya terhadap Ketahanan Sosial Budaya*, Tesis: Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.
- Ihsan, Moch Musoffa, 2015, *Buku 8 Ketahanan Masyarakat Desa*, Jakarta, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Indrawijaya, Adam Ibrahim dan Juni Pranoto. 2011. *Revitalisasi Administrasi Pembangunan*. Bandung: Alfabeta.

- Jurnal Ketahanan Nasional, Vol. 22, No 2, Agustus 2016: 117-136
- Mustaqim, Goris dan Tohari, 2010, Pemuda Membangun Bangsa dari Desa, Bandung, Adityo Offset.
- Kodoatie, Robert J. 2005. Pengantar Manajemen Infrastruktur. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kartohadikoesoemo, Soetardjo. 1984. *Desa*. Jakarta : PN Balai Pustaka.
- Mardapi, Djemari. 2000. *Evaluasi Pendidikan*. Yogyakarta: Mitra Cendikia.
- Miles, Matthew B, A. Michael Huberman dan Johnny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook Edisi Ketiga*. Sage Publications: Inc.
- Mulyatiningsih, Endang. 2011. *Metode Penelitian Terapan Bidang Pendidikan*. Bandung: Alfabet
- Mulyana, Deddy. 2011. *Komunikasi Lintas Budaya*. Bandung: Rosda Karya.
- Maharani S, (2009). *Kanker: Mengenal 13 Jenis Kanker dan Pengobatannya*. Yogyakarta: Katahati.
- Novianti. 2016. *Peranan Karang Taruna Dalam Pembinaan Remaja Di Desa Massenrengpulu Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone*. Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
- Pasalong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Prihatin, Eka. 2011. *Teori Administrasi Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.

- Rosida, Idah, 2014, Partisipasi Pemuda dalam pengembangan Kawasan Ekowisata dan Implikasinya terhadap Ketahanan Masyarakat Desa (Studi di Kawasan Ekowisata Gunung Api Purba Nglanggeran, Desa Nglanggeran, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Tesis: Program Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.
- Siagian, Sondang P. 2003. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soenarko. 2005. Public Policy Pengertian Pokok untuk Memahami dan Analisa Kebijaksanaan Pemerintah. Surabaya: Airlangga University Press.
- Soetomo. 2008. *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Sudriamunawar, Haryono. 2002. Pengantar Study Administrasi Pembangunan. Bandung: Mandar Maju.
- Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung : Penerbit Alfabeta.
- Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook* Edisi Ketiga. Sage Publications: Inc.
- SDD. (2019). *Sumber Data Desa*
- Sugiono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Alfabet

- Suriani. (2017). Mengkaji Peran Pemuda Dalam Program Pembangunan di Desa Mallari Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone. (Tesis). Makassar. Sekolah Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin
- Sururi, A. (2015). Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak. UI Press 3(2).
- Tayibnapis, Farida Yusuf. 2000. Evaluasi Program. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tanpa Nama. 2015. *Undang-Undang RI No. 6 & 43 Tentang Desa, Dana Desa, Peraturan Desa, Pemilihan Kepala Desa, Pembangunan Desa dan Peraturan Pelaksanaannya (PP. & Permendagri No. 60, 27 & 111-114) Tahun 2014 – 2015*. Jakarta : CV. Tamita Utama
- Tilaar H.A.R, 1974, "Tinjauan Pedagogis mengenai Pemuda: Suatu Pendekatan Ekoforis dalam Pemuda dan Perubahan Sosial", Jakarta, LP3ES
- Triyono, L. (2007). *Pembangunan Sebagai Perdamaian*, Yayasan Obor Indonesia : Jakarta.
- UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- UU No. 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan
- Wasistiono, Sadu dan Irwan Tahir. 2007. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: CV. Fokus Media.

- Widodo, Joko. 2007. Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia.
- Widjaja, Haw. 2003. Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Butuh. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS.
- Wirawan. 2011. Evaluasi Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Yustika, Ahmad Erani. 2015. *Tanya Jawab Seputar Undang Undang Desa*. Jakarta : Kemendes PDTT RI
- Yustika, Ahmad Erani. 2015. *Sistem Pembangunan Desa*. Jakarta : Kemendes PDTT RI
- Yustika, Ahmad Erani. 2015. *Kepemimpinan Desa*. Jakarta : Kemendes PDTT RI
- Yustika, Ahmad Erani. 2015. *Pengembangan Desa*. Jakarta : Kemendes PDTT RI
- Yuwono, Teguh. 2001. *Manajemen Otonomi Daerah : Membangun Daerah Berdasar Paradigma Baru*. Semarang : Ciyapps Diponegoro University.

LAMPIRAN

Foto saat penelitian di Desa Bana, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bpne







CURRICULUM VITAE

Data Diri

Nama Lengkap : Nurhan Henriawan
Nama Pangilan : Henrik
Tempat/Tanggal Lahir : Bone, 31 Oktober 1990
Bangsa : Indonesia
Tinggi/Berat : 158 cm/68 kg
E-mail : hendryawan9093@gmail.com
Alamat : BTN Cakra Hidayat D5/6 Gowa



Pendidikan

2017-2019 : Prodi Magister Manajemen Kepemimpinan Pemuda,
Jurusan Perencanaan Pengembangan Wilayah, Universitas Hasanuddin,
Makassar
2010-2013 : Jurusan keuangan dan perbankan STIE Nobel Indonesia
Makassar
2006-2009 : SMA N 1 Bontocani
2003-2006 : SMP N 1 Bontocani
1997-2003 : SD Inpres 10/73 Kahu

Pengalaman Organisasi

2017-2022 : Pengurus KNPI Kota MAKassar

2012-2017 : Pengurus KNPI Kota Makassar

2011 : Pengurus Mahasiswa Pancasila (Mapancas) Kota Makassar

2010-2012 : Ketua bidang social politik BEM Stie Nobel

2009-2011 : Ketua HMI Komisariat STIE Nobel

Pekerjaan

Januari 2018 – Sekarang : Wartawan bidang politik di media online INIKATA.com

Junu 2019 – Sekarang : Wartawan media cetak Harian Radar Luwu Raya